



Pemerintah  
Kabupaten Grobogan



# RENSTRA

## (Rencana Strategis)

### 2025-2029



Dinas Peternakan dan Perikanan  
Kabupaten Grobogan

---

# 2025



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 dapat tersusun.

Secara terperinci, penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan sistematika penyajiannya mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi serangkaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang digunakan, serta implementasinya dalam rencana program dan kegiatan, serta akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan, sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029

Kami menyadari bahwa materi Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon masukan dan koreksi dari semua pihak. Kami berharap materi Renstra ini dapat dipergunakan dan diimplementasikan secara proporsional serta konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan  
Kabupaten Grobogan

Amin Nur Hatta, S.Sos.

**DAFTAR ISI**

<b>Halaman Judul.....</b>	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Gambar.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	9
1.4. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>11</b>
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	11
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan .....	11
2.1.2. Sumber Daya Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan .....	16
2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan.....	37
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan .....	46
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan .....	46
2.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah.....	46
2.1.7. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah .....	46
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	47
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan.	47
2.2.2 Isu Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan.....	48
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>56</b>
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 .....	56
3.2. Strategi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 .....	59
3.3. Arah Kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 .....	60



<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>64</b>
4.1. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan.....	64
4.1.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif.....	64
4.1.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah.....	113
4.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).....	118
4.3. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Peternakan dan Perikanan Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) .....	119
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>120</b>
5.1. Kesimpulan Substansial.....	120
5.2. Kesimpulan Sesuai Kaidah Pelaksanaan .....	120
5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan.....	121

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Distribusi Pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2025 .....	17
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan.....	19
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Jenis Jabatan .....	20
Tabel 2.4	Kondisi ASN Berdasarkan Analisis Jabatan.....	20
Tabel 2.5	Sarana dan Prasarana Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Kondisi Tahun 2025 .....	26
Tabel 2.6	Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Jangka Waktu 5 Tahun (2025-2029)..	36
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2020-2024.....	43
Tabel 2.8	Evaluasi Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.....	43
Tabel 2.9	Perumusan Isu Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan.....	49
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029.....	57
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029.....	59
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029.....	61



Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 .....	70
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 .....	96
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan .....	114
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 .....	118
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 .....	119



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya .....	4
Gambar 2.1	Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Grobogan.....	16
Gambar 2.2	Persentase Produksi Bibit Ternak di Kabupaten Grobogan.....	38
Gambar 2.3	Persentase Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH di Kabupaten Grobogan.....	39
Gambar 2.4	Total Produksi Perikanan di Kabupaten Grobogan .....	40
Gambar 2.5	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Grobogan .....	40
Gambar 2.6	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Grobogan.....	41
Gambar 2.7	Jumlah Produksi Produk Olahan Ikan di Kabupaten Grobogan.....	42



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik (sesuai dengan visi dan misi daerah) yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah untuk mencapai hal tersebut. **Renstra Perangkat Daerah** merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Berdasar hal tersebut, Renstra Perangkat Daerah sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Amanat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Indikatif berarti program atau kegiatan masih berfungsi sebagai acuan awal yang memberikan arah dalam proses perencanaan pembangunan, namun tetap memungkinkan adanya penyesuaian dengan dinamika dan kebutuhan yang muncul selama proses perencanaan dan pelaksanaan.

Secara terperinci, penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan sistematika penyajiannya mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Sebagai dokumen perencanaan, Renstra harus disusun berdasarkan pada program dan kegiatan yang terencana, terukur, dan diharapkan dapat memenuhi kehendak, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat atau *stakeholders*. Penyusunan Renstra PD dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:



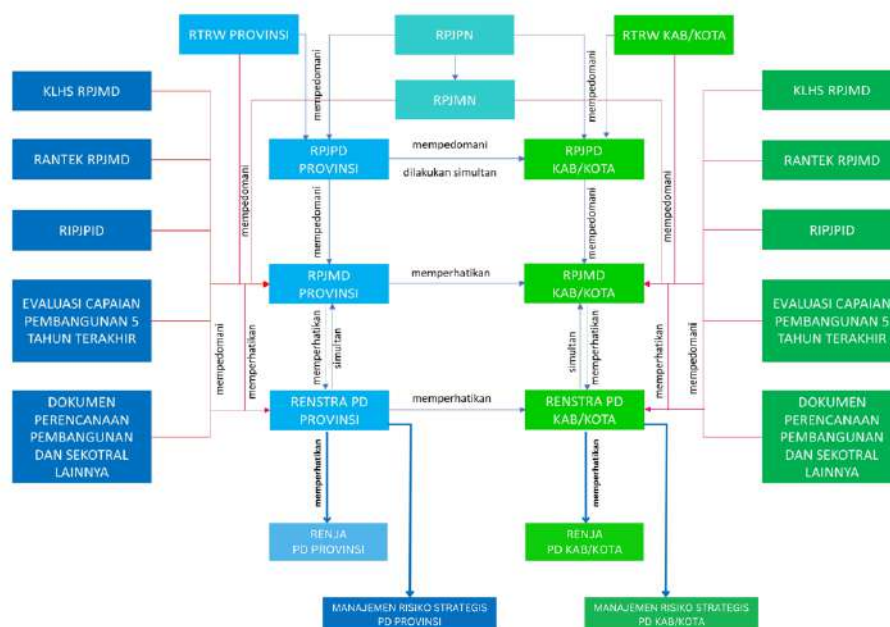
1. **Persiapan Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029.** Pada tahap ini dilakukan Pelaksanaan orientasi penyusunan Renstra PD; Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra PD; Analisis data evaluasi hasil pembangunan 5 (lima) tahun terakhir; Inventaris data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lainnya; dan Hal-hal yang diperlukan dalam proses penyusunan Renstra PD.
2. **Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renstra PD Tahun 2025-2029.** Pada tahap ini dilakukan penyusunan Pendahuluan; Gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis perangkat daerah; Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan; Program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan Penutup.
3. **Penyusunan Rancangan Renstra PD.** Pada tahap ini Bappeda menyampaikan surat edaran Kepala Daerah kepada kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan Ranwal RPJMD. Selanjutnya Perangkat Daerah melakukan Penyusunan Rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029 yang merupakan proses penyempurnaan Ranwal Renstra PD Tahun 2025-2029 menjadi Rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029 berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Rancangan Renstra PD.
4. **Forum PD/Lintas PD.** Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD dikoordinasikan oleh Bappeda dengan pendekatan tematik yang melibatkan PD terkait. Forum PD/Lintas PD dilaksanakan untuk menyepakati keluaran (output) utama Renstra PD, termasuk keluaran (output) untuk melaksanakan program kepala daerah, dan keterhubungan keluaran (output antar-Renstra PD dalam mencapai kinerja hasil (outcome) tematik pembangunan. Forum PD/Lintas PD Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi PD, seperti: pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, akademisi, asosiasi usaha, lembaga swadaya masyarakat, perwakilan/kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak, dan pemangku kepentingan terkait; dan Hasil Forum PD/Lintas PD Tahun 2025-2029 dirumuskan dalam berita acara kesepakatan Forum PD/Lintas PD dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum PD/Lintas PD.
5. **Verifikasi Rancangan Renstra PD.** Pada tahap ini Perangkat daerah melakukan penyempurnaan Ranwal Renstra PD menjadi Rancangan Renstra PD berdasarkan berita acara kesepakatan Forum PD/Lintas PD. Setelah pelaksanaan Forum PD/Lintas Perangkat Daerah, kepala PD menyampaikan Rancangan Renstra PD kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi. Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan



- mengakomodasi hasil Berita Acara Forum PD/Lintas PD. Perangkat daerah menyempurnakan Rancangan Renstra PD berdasarkan hasil verifikasi Bappeda. Rancangan Renstra PD yang telah disempurnakan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.
6. **Perumusan Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029.** Perumusan Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029 menjadi Rankhir Renstra PD berdasarkan Perda tentang RPJMD Tahun 2025-2029. Perumusan Rankhir Renstra PD dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program/kegiatan/ subkegiatan PD berdasarkan strategi, arah kebijakan, program prioritas yang ditetapkan dalam Perda tentang RPJMD.
  7. **Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rankhir Renstra Tahun 2025-2029.** Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 direviu oleh APIP. Hasil Reviu APIP terhadap Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029 disampaikan kepada Perangkat Daerah; dan Perangkat Daerah menyempurnakan Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029 berdasarkan Hasil Reviu APIP.
  8. **Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD.** Pada tahap ini Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Akhir Renstra PD yang telah disempurnakan berdasarkan Hasil Reviu APIP kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi sebelum ditetapkan; Verifikasi harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, program, kegiatan, dan subkegiatan pada Rancangan Akhir Renstra PD sudah selaras dengan Perda RPJMD Tahun 2025-2029. Apabila hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) tersebut di atas, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
  9. **Penetapan Renstra PD Tahun 2025-2029.** Pada tahap ini, Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029 yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda untuk dilakukan proses penetapan Renstra PD. Bappeda menyampaikan Rankhir Renstra PD Tahun 2025-2029 yang telah difervikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Penetapan Perkada Renstra PD Tahun 2025-2029 paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan.



Seiring dengan disusunnya RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029, maka Perangkat Daerah termasuk Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan wajib menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada RPJMD tersebut, dan memperhatikan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih, Renstra Kementerian/Lembaga, Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan agar sesuai dan sejalan dengan Kebijakan dan Arah Pembangunan Nasional dan Daerah. Penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 juga mempertimbangkan isu-isu daerah dan nasional, utamanya yang berkaitan dengan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.



**Gambar 1.1. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya**

Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan memiliki kedudukan yang sangat penting karena akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Perikanan. Renja merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025-2029, dan akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Dinas Peternakan dan Perikanan



Kabupaten Grobogan wajib melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Grobogan dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka Penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029.

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Peraturan Perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
5. Undang-Undang 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-



- Undanguan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
  8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
  9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  11. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah



- Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  17. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
  18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
  19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  20. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah



- dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 1);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2022-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6);



30. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5);
32. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 35), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Nomor 22);
33. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 77).

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Sebagai penjabaran atas RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2022-2029, sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan.
2. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan selama kurun waktu 5 tahun (2025-2029).

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas.



2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan setiap tahunnya.
3. Sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, berisi tentang Latar belakang, Dasar hukum penyusunan, Maksud dan tujuan, dan Sistematika penulisan.

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**, berisi tentang Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, meliputi: Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah; Sumber daya Perangkat Daerah; Kinerja pelayanan Perangkat Daerah, Kelompok sasaran layanan, Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan, Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah, dan Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah, dan Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, meliputi: Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dan Isu strategis.

**BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**, berisi tentang Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029, Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARMN BIDANG URUSAN**, berisi tentang Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

**BAB V PENUTUP**, berisi tentang kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.



## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

#### **2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan**

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan dibentuk berdasarkan mandat dari Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan Dinas Tipe A, yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan, dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. Pelaksanaan tugas-tugas yang dimandatkan dalam Perda tersebut dipertegas melalui Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 77 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan.

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 77 Tahun 2024 menjelaskan bahwa Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan. Dinas Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Struktur organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan terdiri dari Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang , 3 (tiga) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun susunan organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan secara lengkap terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi:
  - 1) Sub bagian perencanaan;
  - 2) Sub bagian keuangan
  - 3) Sub bagian umum



3. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
4. Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak
5. Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolah dan Pemasaran
6. Bidang Perikanan
7. UPTD
8. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 77 Tahun 2024, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sampai dengan satu eselon di bawah kepala dinas dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan.

Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan;
- b. pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan;
- c. pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan;
- d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan;
- e. pengelolaan kesekretariatan dinas;
- f. UPTD; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

### **2. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas, menyelenggarakan administrasi umum, surat-menyurat, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga,



protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan serta penyusunan perencanaan program dan pelaporan.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan Dinas;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas ketatausahaan, administrasi umum dan surat-menyurat;
- d. pengelolaan kepegawaian, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan dinas, hukum, kearsipan, pengelolaan perencanaan program dan penyusunan pelaporan;
- e. pengelolaan keuangan, perjalanan dinas dan pertanggungjawaban keuangan;
- f. penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

### **3. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan**

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan.

Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan; dan



- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak**

Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perbibitan dan produksi ternak.

Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perbibitan dan produksi ternak;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang perbibitan dan produksi ternak;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang perbibitan dan produksi ternak;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perbibitan dan produksi ternak;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perbibitan dan produksi ternak; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **5. Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolah dan Pemasaran**

Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

Kepala Bidang Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi :



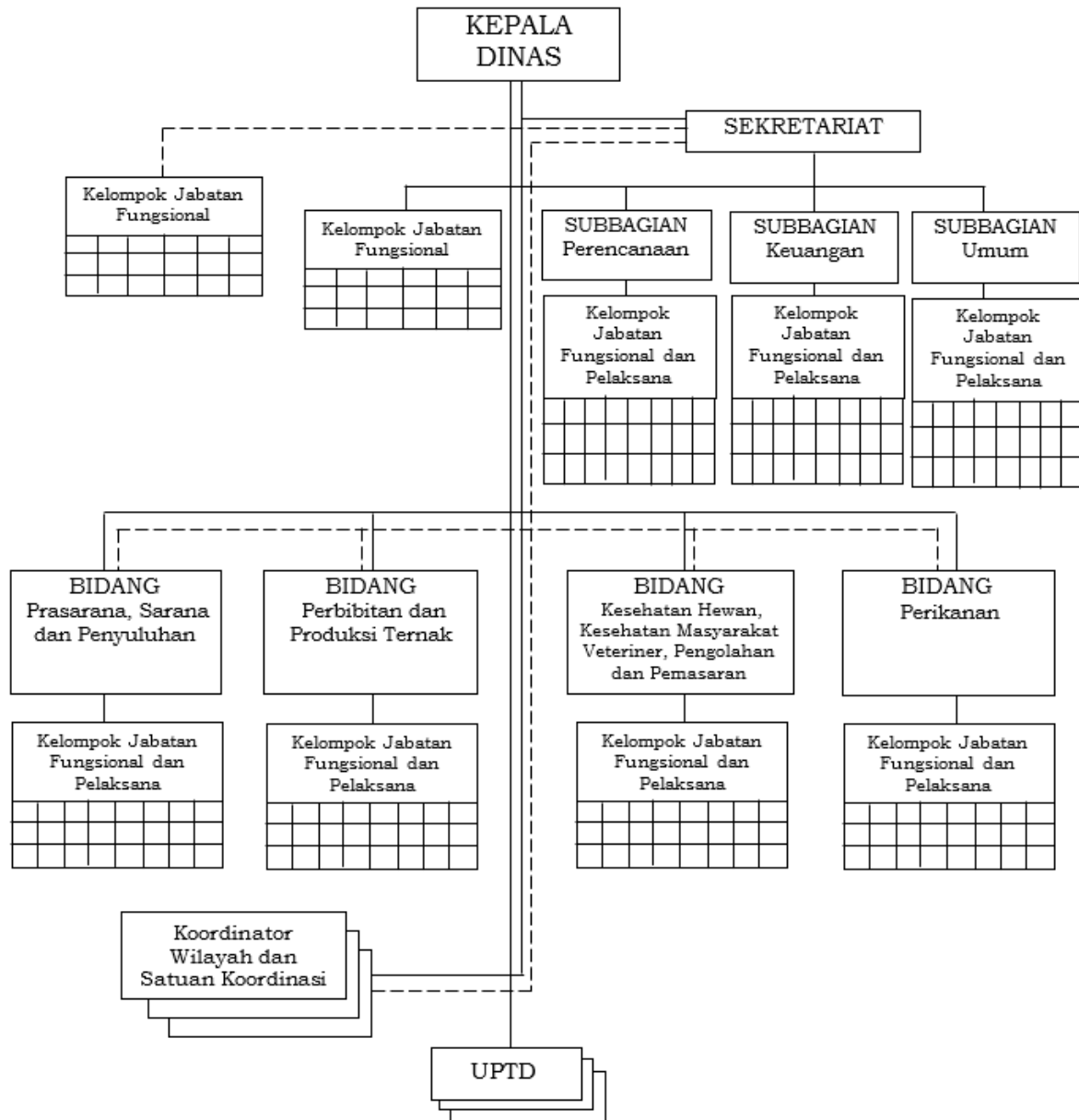
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **6. Bidang Perikanan**

Bidang Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perikanan.

Kepala Bidang Perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang perikanan;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang perikanan;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perikanan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perikanan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



**Gambar 2.1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Grobogan**

### 2.1.2. Sumber Daya Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan

#### 1. Susunan Kepegawaian

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang memadai untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan pada tahun 2025 memiliki pegawai (ASN) sebanyak 68 orang,



dan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 43 orang. Jika dilihat dari jenis kelamin, pegawai ASN laki-laki berjumlah 21 orang, dan perempuan 20 orang. Pegawai PPPK laki-laki berjumlah 13 orang, dan perempuan 15 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.1

## Distribusi Pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No.	Jabatan	ASN		PPPK		THL		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
1	Kepala Dinas Peternakan Dan Perikanan	1	-					1
2	Sekretaris		1					1
3	Kepala Bidang Perbibitan Dan Produksi Ternak		1					1
4	Kepala Bidang Prasarana, Sarana Dan Penyuluhan		1					1
5	Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan Dan Pemasaran	1						1
6	Kepala Bidang Perikanan	1						1
7	Kepala UPTD Rumah Potong Hewan Kelas A	1						1
8	Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kelas A		1					1
9	Kepala UPTD Balai Benih Ikan Kelas A	1						1
10	Kepala Sub Bagian Keuangan		1					1
11	Kepala Sub Bagian Perencanaan		1					1
12	Kepala Sub Bagian Umum	1						1
13	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Rumah Potong Hewan Kelas A		1					1
14	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kelas A	1						1
15	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Benih Ikan Kelas A	1						1
16	Arsiparis Terampil			1				1
17	Analisis Akuakultur Ahli Pertama			1				1
18	Analisis Pasar Hasil Perikanan Pertama / Ahli Pertama			1				1



No.	Jabatan	ASN		PPPK		THL		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
19	Medik Veteriner Ahli Pertama	1		3	3			7
20	Medik Veteriner Ahli Muda		2					2
21	Operator Layanan Operasional	2						2
22	Pengadministrasi Perkantoran	4	3					7
23	Penelaah Teknis Kebijakan	2	1					3
24	Paramedik Veteriner Terampil	1			2			3
25	Pembina Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan Ahli Muda		1					1
26	Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama		1	1	2			4
27	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda	1	2					3
28	Pengawas Alat Dan Mesin Pertanian Ahli Pertama			1				1
29	Pengelola Layanan Operasional	1						1
30	Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda		1					1
31	Penyuluh Pertanian Ahli Muda		2					2
32	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama			1				1
33	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama			1	1			2
34	Pranata Komputer Ahli Pertama	1		1				2
35	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama			2	6			8
36	Penyuluh Pertanian Terampil				1			1
37	Tenaga Harian Lepas					38	5	43
<b>TOTAL</b>		<b>21</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>38</b>	<b>5</b>	<b>112</b>

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan, 2025

Berdasarkan kepangkatan dan golongan, diketahui bahwa pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan paling banyak tersebar di Golongan IIIa yaitu sebanyak 22 orang pegawai, diikuti oleh Golongan IIIb sebanyak 12 orang



pegawai, dan Golongan III d sebanyak 11 pegawai. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 2.2****Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II a	1		1
2	Golongan II c	5	4	9
3	Golongan II d	1		1
4	Golongan III a	13	9	22
5	Golongan III b	5	7	12
6	Golongan III c	3	1	4
7	Golongan III d	4	7	11
8	Golongan IV a	2	4	6
9	Golongan IV b		1	1
10	Golongan IV c	1		1
	<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>33</b>	<b>68</b>

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan, 2025

Jika dilihat berdasarkan jenis jabatan, Pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan paling banyak menduduki jabatan Fungsional Tertentu yaitu sebanyak 40 orang, kemudian diikuti oleh pegawai dengan jabatan Pelaksana sebanyak 13 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 2.3****Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Jenis Jabatan**

No	Jenis Jabatan	L	P	Jumlah
1	Pimpinan Tinggi Pratama	1		1
2	Pengawas	5	4	9
3	Pelaksana	9	4	13
4	Administrator	3	2	5
5	Fungsional Tertentu	17	23	40
	<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>33</b>	<b>68</b>

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan, 2025

Berdasarkan Keputusan Bupati Grobogan Nomor 061/473/2022 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, kebutuhan pegawai di Dinas Peternakan dan Perikanan sebanyak



316 orang. Pada tahun 2025, jumlah pegawai baru tersedia sebanyak 111 orang sehingga terdapat kekurangan sebanyak 193 orang. Hasil analisis jabatan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4

## Kondisi ASN Berdasarkan Analisis Jabatan

No	Nama Jabatan	ABK	ASN			NON ASN	Jumlah Pegawai	Selisih ABK
			CPNS/PNS	PPPK	Jumlah ASN			
1	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan	1	1	0	1		1	0
2	JF Penyuluh Pertanian Madya	4	0	0	0		0	-4
3	JF Pengawas Mutu Pakan Madya	1	0	0	0		0	-1
4	JF Pengawas Bibit Ternak Madya	1	0	0	0		0	-1
5	JF Medik Veteriner Madya	4	0	0	0		0	-4
6	JF Pengawas Perikanan Madya	2	0	0	0		0	-2
7	JF Analis Pasar Hasil Perikanan Madya	2	0	0	0		0	-2
8	JF Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Madya	2	0	0	0		0	-2
9	JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya	1	0	0	0		0	-1
10	JF Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Madya	1	0	0	0		0	-1
11	JF Analis Akuakultur Madya	1	0	0	0		0	-1
12	JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Madya	1	0	0	0		0	-1
13	JF Pranata Komputer Madya	1	0	0	0		0	-1
14	Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan	1	1		1		1	0
15	JF Pranata Komputer Muda	2	0	0	0		0	-2
16	Kepala Subbagian Perencanaan	1	1	0	1		1	0
17	Analisis Perencanaan evaluasi dan Pelaporan	2	0	0	0	2	2	0
18	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	2	0	0	0	1	1	-1
19	JF Pranata Komputer Pertama	2	1	0	1	1	2	0
20	Kepala Subbagian Keuangan	1	1	0	1		1	0
21	Analisis Keuangan	1	1	0	1		1	0



No	Nama Jabatan	ABK	ASN			NON ASN	Jumlah Pegawai	Selisih ABK
			CPNS/PNS	PPPK	Jumlah ASN			
22	Bendahara	4	0	0	0	4	4	0
23	Penyusun Laporan Keuangan	1	0	0	0	1	1	0
24	Pengelola Keuangan	2	1	0	1	1	2	0
25	Pengelola Gaji	1	0	0	0		0	-1
26	Pengadministrasi Keuangan	2	0	0	0	2	2	0
27	Kepala Subbagian Umum	1	1	0	1		1	0
28	JF Arsiparis Penyelia	1	0	0	0		0	-1
29	JF Arsiparis Mahir	1	0	0	0		0	-1
30	JF Arsiparis Terampil	1	0	0	0	1	1	0
31	Analisis Tata Usaha	1	1	0	1		1	0
32	Pengelola Barang Milik Negara	2	0	0	0	2	2	0
33	Pengelola Kepegawaian	1	0	0	0	1	1	0
34	Pengadministrasi Kepegawaian	1	1	0	1		1	0
35	Pengadministrasi Persuratan	1	1	0	1		1	0
36	Pengadministrasi Umum	4	2	0	2	2	4	0
37	Petugas Keamanan	2	0	0	0	2	2	0
38	Pengemudi	2	0	0	0	1	1	-1
39	Pramu Kebersihan	4	0	0	0	4	4	0
40	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	1	1		1		1	0
41	JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Muda	1	1	0	1		1	0
42	JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Pertama	1	0	0	0		0	-1
43	JF Pengawas Mutu Pakan Muda	2	1	0	1		1	-1
44	JF Pengawas Mutu Pakan Pertama	1	0	0	0		0	-1
45	JF Penyuluh Pertanian Muda	8	1	0	1		1	-7
46	JF Penyuluh Pertanian Pertama	8	1	2	3	3	6	-2
47	JF Penyuluh Pertanian Penyelia	6	0	0	0		0	-6
48	JF Penyuluh Pertanian Mahir	2	0	0	0		0	-2
49	JF Penyuluh Pertanian Terampil	1	0	0	0		0	-1

**RENSTRA 2025-2029****Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan**

No	Nama Jabatan	ABK	ASN			NON ASN	Jumlah Pegawai	Selisih ABK
			CPNS/PNS	PPPK	Jumlah ASN			
50	Analisis Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan	1	0	0	0	1	1	0
51	Analisis Pakan Ternak	2	0	0	0	1	1	-1
52	Analisis Program Penyuluhan	1	0	0	0	1	1	0
53	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	1	0	0	0	1	1	0
54	Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak	1	1	0	1		1	0
55	JF Pengawas Bibit Ternak Muda	4	3	0	3		3	-1
56	JF Pengawas Bibit Ternak Pertama	6	1	0	1		1	-5
57	JF Penyuluh Pertanian Muda	8	0	0	0		0	-8
58	JF Penyuluh Pertanian Pertama	8	0	0	0	1	1	-7
59	Pengawas Mutu Bibit Ternak	2	0	0	0		0	-2
60	Pengawas Mutu Pakan Dan Produksi Bibit Ternak Besar	5	0	0	0	2	2	-3
61	Pengawas Mutu Pakan Dan Produksi Bibit Ternak Kecil dan Unggas	3	2		2		2	-1
62	Pengelola Budidaya Pengembangan Ternak Dan Hewan Lainnya	3	0	0	0		0	-3
63	Pengelola Peternakan	8	1	0	1	5	6	-2
64	Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran	1	1	0	1		1	0
65	JF Medik Veteriner Muda	4	3	0	3		3	-1
66	JF Medik Veteriner Pertama	13	1	0	1	6	7	-6
67	JF Paramedik Veteriner Mahir	5	0	0	0		0	-5
68	JF Paramedik Veteriner Penyelia	5	0	0	0		0	-5
69	JF Paramedik Veteriner Terampil	6	1	0	1		1	-5
70	JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda	1	1	0	1		1	0
71	JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama	1	0	0	0		0	-1

**RENSTRA 2025-2029****Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan**

No	Nama Jabatan	ABK	ASN			NON ASN	Jumlah Pegawai	Selisih ABK
			CPNS/PNS	PPPK	Jumlah ASN			
72	Analisis Mutu Hasil Perikanan	2	0	0	0		0	-2
73	Pengawas Penyakit Dan Pengendali Penyakit Hewan	2	0	0	0		0	-2
74	Pengawas Sanitasi Usaha Peternakan, dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2	0	0	0		0	-2
75	Pengelola Budidaya Pengembangan Ternak Dan Hewan Lainnya	4	2	0	2		2	-2
76	Pengelola Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2	0	0	0		0	-2
77	Pengelola Kesehatan Ternak Besar, Kecil Dan Unggas	10	3	0	3		3	-7
78	Kepala Bidang Perikanan	1	1	0	1		1	0
79	JF Analisis Akuakultur Muda	1	1	0	1		1	0
80	JF Analisis Akuakultur Pertama	1	0	0	0		0	-1
81	JF Analisis Pasar Hasil Perikanan Muda	8	0	0	0		0	-8
82	JF Analisis Pasar Hasil Perikanan Pertama	8	0	0	0	2	2	-6
83	JF Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Muda	2	1	0	1		1	-1
84	JF Pengawas Perikanan Muda	8	0	0	0		0	-8
85	JF Pengawas Perikanan Pertama	8	0	0	0	1	1	-7
86	JF Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda	8	1	0	1		1	-7
87	JF Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama	8	0	0	0	3	3	-5
88	Analisis Budidaya Perikanan	1	0	0	0		0	-1
89	Analisis Pengujian Kelaikan Alat Penangkap Ikan	1	0	0	0		0	-1
90	Pengawas Penyakit Dan Pengendali Penyakit Ikan	2	0	0	0		0	-2
91	Pengelola Pengawasan Pembudidayaan Ikan	1	0	0	0	1	1	0
92	Kepala UPTD Rumah Potong Hewan Kelas A	1	1	0	1		1	0
93	Kepala Subag TU UPTD Rumah Potong Hewan Kelas A	1	1	0	1		1	0



No	Nama Jabatan	ABK	ASN			NON ASN	Jumlah Pegawai	Selisih ABK
			CPNS/PNS	PPPK	Jumlah ASN			
94	Pengelola Keuangan	2	1	0	1		1	-1
95	Pengelola Rumah Potong Hewan	2	0	0	0		0	-2
96	Pengadministrasi Umum	4	0	0	0	1	1	-3
97	Pengadministrasi Kepegawaian	2	0	0	0	1	1	-1
98	Petugas Keamanan	2	0	0	0	1	1	-1
99	Pramu Kebersihan	6	0	0	0	1	1	-5
100	Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kelas A	1	1	0	1		1	0
101	JF Paramedik Veteriner Penyelia	8	0	0	0	1	1	-7
102	Kepala Subag TU UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kelas A	1	1	0	1		1	0
103	Pengelola Keuangan	1	0	0	0		0	-1
104	Pengelola Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	4	1	0	1	1	2	-2
105	Pengadministrasi Umum	1	0	0	0	1	1	0
106	Pengadministrasi Kepegawaian	1	0	0	0	1	1	0
107	Petugas Keamanan	1	1	0	1	1	2	1
108	Pramu Kebersihan	1	0	0	0	1	1	0
109	Kepala UPTD Balai Benih Ikan Kelas A	1	1	0	1		1	0
110	JF Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama	2	0	0	0		0	-2
111	Kepala Subag TU UPTD Balai Benih Ikan Kelas A	1	1	0	1		1	0
112	Pengelola Keuangan	1	0	0	0	1	1	0
113	Pengelola Teknologi Perbenihan	1	0	0	0	1	1	0
114	Pengadministrasi Umum	1	0	0	0	1	1	0
115	Pengadministrasi Kepegawaian	1	0	0	0	1	1	0
116	Pramu Benih Ikan	1	0	0	0	1	1	0
117	Petugas Keamanan	1	0	0	0	1	1	0



No	Nama Jabatan	ABK	ASN			NON ASN	Jumlah Pegawai	Selisih ABK
			CPNS/PNS	PPPK	Jumlah ASN			
118	Pramu Kebersihan	1	0	0	0	1	1	0
Jumlah		316	51	2	53	70	123	-193

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan, 2025

## 2. Sarana dan Prasarana

Sumber daya sarana dan Prasarana diperlukan dalam menunjang kinerja aparatur Dinas Peternakan dan Perikanan agar tujuan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya peternak dan kelompok tani ternak di wilayah Kabupaten Grobogan dapat tercapai. Sumber daya sarana dan prasarana di lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan meliputi dua unit usaha yaitu Balai Benih Ikan (BBI) dan Rumah Potong Hewan (RPH), sejumlah aset bangunan gedung; jalan, jaringan dan instalasi; peralatan dan mesin; beberapa bidang tanah; serta aset tetap lainnya.

Unit usaha Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan berupa dua unit usaha yaitu :

- a. Balai Benih Ikan (BBI), terletak di 2 (dua) lokasi yaitu BBI Karangasem di Desa Karangasem Kecamatan wirosari seluas 24.330 m<sup>2</sup> dan BBI Karangrayung di Desa Sumberrejosari Kecamatan Karangrayung seluas 12.555 m<sup>2</sup>.
- b. Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia Kelas A yang berlokasi di Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan.

Rincian sumber daya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.



Tabel 2.5

## Sarana dan Prasarana Dinas Peternakan dan Perikanan

## Kabupaten Grobogan Kondisi Tahun 2025

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Keterangan atau Kondisi
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1029	m2	Gedung Kantor Bidang Perikanan
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3875	m2	Gedung Tempat Kerja Dan Gedung Aula Rapat Mushola Lap. Tenis Poskeswan Garasi Gudang
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	285	m2	Gedung Puskesmas Wirosari
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5640	m2	Rph, Rumah Jaga, Ipal, Insenerator, Kolam Limbah
5	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	12555	m2	Gedung Bbi Dan Kolam Pembenihan Ikan
6	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	8720	m2	Gedung Bbi Dan Kolam Pembenihan Ikan
7	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	13633	m2	Perluasan Bbi Karangasem
8	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	2894	m2	Bbi Sumber Jatipohon
9	Alat Angkutan.Lain-Lain	5	ukuran/CC	150
10	Alat Angkutan.Gerobak Tarik	5	ukuran/CC	100 X 40 X 70
11	Alat Angkutan.Gerobak Dorong	15	ukuran/CC	65 Liter
12	Alat Angkutan.Station Wagon	7	ukuran/CC	1493
13	Alat Angkutan.Pick Up	2	ukuran/CC	2494
14	Alat Angkutan.Sepeda Motor	52	ukuran/CC	125
15	Alat Bengkel Dan Alat Ukur.Pisau Kulit	37	unit	15cm
16	Alat Bengkel Dan Alat Ukur.Global Positioning System	1	unit	Global Positioning System (Gps)
17	Alat Bengkel Dan Alat Ukur.Lain-Lain	1	unit	Alat Timbangan Lain-Lain
18	Alat Bengkel Dan Alat Ukur.Spraygun	2	unit	
19	Alat Bengkel Dan Alat Ukur.Termometer Standar	9	unit	
20	Alat Bengkel Dan Alat Ukur.Termometer Governmen Tester 0 Derajat Sampai Dengan 100 Derajat C	11	unit	Termometer Digital
21	Alat Besar.Portable Water Pump	3	unit	1
22	Alat Besar.Sumersible Pump	2	unit	1pk
23	Alat Bengkel Dan Alat Ukur.Timbangan Meja Kapasitas 10 Kg	2	unit	
24	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.A.C. Sentral	10	unit	
25	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.A.C. Split	26	unit	
26	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Ac Unit	4	unit	



No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Keterangan atau Kondisi
27	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Alat Pemadam/Portable	15	unit	Alat Pemadam Kebakaran Ampar 3kg
28	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Brandkas	2	unit	
29	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Alat Penghancur Kertas	1	unit	
30	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Bangku Tunggu	3	unit	
31	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Exhause Fan	2	unit	
32	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Amplifier	1	unit	
33	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Filing Cabinet Besi	2	unit	
34	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Kursi Biasa	15	unit	
35	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Kipas Angin	32	unit	
36	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Kompur Gas (Alat Dapur)	1	unit	
37	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Gordyin/Kray	1	unit	
38	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Kursi Kayu	17	ukuran/CC	2x4
39	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Kursi Kerja Pejabat Eselon Ii	1	unit	
40	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Kursi Kerja Pejabat Eselon Iii	4	unit	
41	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	17	unit	
42	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Kursi Rapat	91	unit	
43	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Kursi Putar	15	unit	
44	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Kursi Lipat	40	unit	
45	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Kursi Kerja Pejabat Eselon V	10	unit	
46	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Lcd Projector/Infocus	1	unit	
47	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Layar Proyektor/Screen	1	unit	
48	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Lain-Lain	73	unit	
49	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Kursi Rapat Ruang Rapat Staf	64	unit	
50	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Lemari Buku Untuk Perpustakaan	8	unit	



No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Keterangan atau Kondisi
51	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Lemari Kayu	14	unit	
52	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Lemari Kaca	1	unit	
53	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Lemari Obat	13	unit	
54	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Lemari Pakaian	4	unit	
55	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Lemari Es	11	unit	
56	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Lemari Sorok	3	unit	
57	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Meja Kerja Kayu	7	unit	
58	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Meja 1/2 Biro	9	unit	
59	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Meja Kayu/Rotan	12	unit	
60	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Meja Kerja Pegawai Non Struktural	34	unit	
61	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Meja Komputer	4	unit	
62	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Meja Kerja Pejabat Eselon Ii	2	unit	
63	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Meja Kerja Pejabat Eselon Iii	7	unit	
64	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Meja Kerja Pejabat Eselon V	29	unit	
65	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Meja Rapat	9	unit	
66	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Meja Podium	1	unit	
67	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Meja Periksa Pasien	1	unit	
68	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Meja Tamu	1	unit	
69	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Meja Rapat Pejabat Eselon Iii	4	unit	
70	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	4	unit	
71	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1	unit	
72	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Papan Data/Informasi	1	unit	
73	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	unit	
74	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Meja Tamu Biasa	10	unit	



No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Keterangan atau Kondisi
75	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Rak Besi	5	unit	
76	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Rak Kayu	12	unit	
77	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Papan Nama Instansi	1	unit	
78	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Sofa	8	unit	
79	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Reach In Frezzer	1	unit	
80	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Tempat Tidur Kayu	5	unit	
81	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Teralis	42	unit	
82	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Tabung Gas	3	unit	
83	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Televisi	7	unit	
84	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Sound System	3	unit	
85	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Treng Air/Tandon Air	2	unit	
86	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Unit Power Supply	1	unit	
87	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Tustel	2	unit	
88	Alat Kantor Dan Rumah Tangga.Timbangan Barang	2	unit	
89	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan.Alat Pemotong Tanduk (Dehorner)	1	unit	
90	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan.Chateter Cat/Tom Catheter	1	unit	
91	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan.Alat Potong Kuku:-Hoof Knife-Right Hand	1	unit	
92	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan.Bone Cutting (Gunting Tulang)	7	unit	
93	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan.Alat Deteksi Kebuntingan	1	unit	
94	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan.Castration Knife	1	unit	
95	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan.Box Stainless	5	unit	
96	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan.Bulholder	1	unit	
97	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan.Bedah Minor	2	unit	
98	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan.Calf Snarefarrowing Snare	1	unit	



No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Keterangan atau Kondisi
99	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan.Head Lamp (Alat Kedokteran Umum)	1	unit	
100	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan.Kulkas Reagent	5	unit	
101	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan.Drenching Gun	1	unit	
102	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan.Kandang Travelling	1	unit	
103	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan.Kandang Travelling	6	unit	
104	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan.Forceps For Caesarian Section+Serrated Rubber Jaws	2	unit	
105	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan.Eye Hooks Uk 6,5 - 8 Cm	1	unit	
106	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan.Double Obstetric Hooks 14 Cm	1	unit	
107	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan.Kandang Rawat Inap	7	unit	
108	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan.Drenching Gun Volume 30 Ml	1	unit	
109	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan.Ear Tag Aplikator	3	unit	
110	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan.Lemari Obat (Kaca)	2	unit	
111	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan.Meja Operasi Minor	1	unit	
112	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan.Lampu Gynaecologi	2	unit	
113	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan.Meja Bedah	7	unit	
114	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan.Meja Pemeriksaan Stainless	2	unit	
115	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan.Obstetric Hooks Key Shooter 21 Cm	1	unit	
116	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan.Obstetrik Chain Handle Uk. 180 Cm	1	unit	
117	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan.Obstetric Chain Introducer Nylon, 8-Formed, Soft, 10mm, 2m Long	1	unit	
118	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan.Paragon Knife Handle (Pisau Steril Dengan Gagang Berukuran Panjang 20-24cm Dan 9-12cm)	2	unit	



No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Keterangan atau Kondisi
119	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan.Lain-Lain	7	unit	
120	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan.Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	8	unit	
121	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan.Standar Infus	3	unit	
122	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan.Trocart	2	unit	
123	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan.Termometer Merkuri Untuk Suhu Badan	3	unit	
124	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan.Ultra Sonography (Usg)	2	unit	
125	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan.Tabung Oksigen	2	unit	
126	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan.Waskom Stainless	2	unit	
127	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan.Timbangan Elektronik Untuk Hewan Kecil	1	unit	
128	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan.Zonde	3	unit	
129	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan.Refrigerator Ac/Dc	2	unit	
130	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan.Tongkat Ukur, Lokal	1	unit	
131	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan.Tali Laso	1	unit	
132	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan.Vulva Pin Insertion Needle	1	unit	
133	Alat Komputer.P.C Unit	15	unit	
134	Alat Komputer.Lap Top	37	unit	
135	Alat Komputer.Note Book	26	unit	
136	Alat Komputer.Hard Disk	1	unit	
137	Alat Komputer.Printer	8	unit	
138	Alat Komputer.Printer (Peralatan Personal Komputer)	31	unit	
139	Alat Laboratorium.Mikroskop Binocular	9	unit	
140	Alat Laboratorium.Autoclave (Alat Laboratorium Umum)	2	unit	
141	Alat Laboratorium.Container N2 Cair (Alat Laboratorium Umum)	6	unit	
142	Alat Laboratorium.Haemocytometer	1	unit	
143	Alat Laboratorium.Cooler (Alat Laboratorium Makanan)	2	unit	



No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Keterangan atau Kondisi
144	Alat Laboratorium.Centrifuge (Alat Laboratorium Pertanian)	2	unit	
145	Alat Laboratorium.Liquid N2 Container	11	unit	
146	Alat Laboratorium.Inseminasi Gun	6	unit	
147	Alat Laboratorium.Alat Pemadam Kebakaran	5	unit	
148	Alat Laboratorium.Mikroskop	1	unit	
149	Alat Laboratorium.Alat Uji Kadar Air Daging	4	unit	
150	Alat Laboratorium.Meja Laborat Pertanian	3	unit	
151	Alat Laboratorium.Alat Bedah	2	unit	
152	Alat Laboratorium.Katrol	10	unit	
153	Alat Laboratorium.Orgen/Electrone	1	unit	
154	Alat Komputer.Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	unit	
155	Alat Pertanian.Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	18	unit	
156	Alat Pertanian.Mesin Pemotong Rumput	2	unit	
157	Alat Pertanian.Kandang Hewan	2	unit	
158	Alat Pertanian.Lain-Lain	20	unit	
159	Alat Pertanian.Bak Pemeliharaan Sementara	3	unit	
160	Alat Pertanian.Bak Angkut Benih Ikan	2	unit	
161	Alat Pertanian.Tabung Oksigen 1 M3	2	unit	
162	Alat Pertanian.Waring	1	unit	
163	Alat Pertanian.Bak Pengangkut Ikan	1	unit	
164	Alat Pertanian.Tabung Oksigen 6 M3	2	unit	
165	Alat Pertanian.Mesin Pengering Tipe Rak	1	unit	
166	Alat Pertanian.Trolley	5	unit	
167	Alat Pertanian.Stick Pengukur Sapi	4	unit	
168	Alat Pertanian.Waight Band	5	unit	
169	Alat Pertanian.Container	28	unit	
170	Alat Pertanian.Insemination Gun	2	unit	
171	Alat Pertanian.Restrict / Stal Ib	40	unit	
172	Alat Laboratorium.Sentrifus Elektrik	1	unit	
173	Alat Laboratorium.Timbangan Digital	2	unit	
174	Alat Laboratorium.Ph Meter Elektrik	1	unit	
175	Alat Laboratorium.Termos Es Laborat	5	unit	
176	Alat Laboratorium.Safety Container	6	unit	
177	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Power Supply Microphone	3	unit	
178	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Digital Led Running Text	1	unit	



No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Keterangan atau Kondisi
179	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Camera +Attachmen	4	unit	
180	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Wireless Microphone (Conference System)	1	unit	
181	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Stand Speaker (Conference System)	1	unit	
182	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Camera Electronic	1	unit	
183	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Layar Film/Projector	2	unit	
184	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Printer (Peralatan Studio Video Dan Film)	11	unit	
185	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Timbangan Obat	1	unit	
186	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Timbang Hewan	1	unit	
187	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Pesawat Telephone	4	unit	
188	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Amplifier	1	unit	
189	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Microphone	1	unit	
190	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Sound System	1	unit	
191	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Telephone Paralel	2	unit	
192	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar.Slide Projector (Lapangan)	1	unit	
193	Bangunan Gedung.Gedung Pemotong Hewan Permanen	1	unit	BAIK (Gedung Pemotongan Hewan)
194	Bangunan Gedung.Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	unit	Baik (Bangunan Gedung Kantor Disnakkan)
195	Bangunan Gedung.Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	unit	Baik (Aula Disnakkan)
196	Bangunan Gedung.Bangunan Rumah Sakit Hewan	1	unit	Rusak Ringan (Pos Jaga Pemeriksaan Keswan Pasar Wirosari)
197	Bangunan Gedung.Bangunan Rumah Sakit Hewan	1	unit	RUSAK RINGAN (Puskesmas Di Pasar Hewan Danyang)
198	Bangunan Gedung.Bangunan Rumah Sakit Hewan	1	unit	RUSAK RINGAN (Pos Kesehatan Hewan Di Pasar Hewan Godong)
199	Bangunan Gedung.Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	unit	Baik (Bangunan Gedung Kantor Subdin Perikanan)
200	Bangunan Gedung.Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	unit	Baik (Gudang Bbi Karangasem)



No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Keterangan atau Kondisi
201	Bangunan Gedung.Bangunan Kolam/Bak Ikan	1	unit	Rusak Ringan (Bangunan Kolam Ikan Karang Asem)
202	Tugu Titik Kontrol/Pasti.Pagar Permanen	1	unit	Baik (Pagar Bbi Karangasem))
203	Bangunan Gedung.Bangunan Kolam/Bak Ikan	1	unit	Rusak Ringan (Kolam Ikan Bbi Karang Asem)
204	Bangunan Gedung.Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	1	unit	Baik (Garasi )
205	Bangunan Gedung.Bangunan Kolam/Bak Ikan	1	unit	Rusak Ringan (Komplek Bbi Karangasem)
206	Tugu Titik Kontrol/Pasti.Pagar Permanen	1	unit	BAIK (Pagar Kantor Disnakkan)
207	Bangunan Gedung.Lain-Lain	1	unit	Baik (Jalan Masuk Bbi Karangrayung)
208	Bangunan Gedung.Bangunan Lumbung Pangan	1	unit	BAIK (Rumah Pompa Air) POS GENSET
209	Bangunan Gedung.Bangunan Kolam/Bak Ikan	1	unit	Rusak Ringan (Kompleks Bbi Karangrayung)
210	Tugu Titik Kontrol/Pasti.Pagar Permanen	1	unit	BAIK (Pagar Kantor RPH Getasrejo)
211	Tugu Titik Kontrol/Pasti.Pagar Permanen	1	unit	Baik (Pagar Bbi Karangrayung)
212	Bangunan Gedung.Bangunan Balai Penyuluhan	1	unit	Baik (Aula Perikanan)
213	Bangunan Gedung.Bangunan Rumah Sakit Hewan	1	unit	Baik (Puskesmas Wirosari)
214	Bangunan Gedung.Bangunan Rumah Sakit Hewan	1	unit	Baik (Bangunan Puskesmas Kradenan)
215	Bangunan Gedung.Lain-Lain	1	unit	Baik (Rumah Jaga Rph Getasrejo)
216	Bangunan Gedung.Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	unit	Baik (Bangunan Gedung Kantor Puskesmas Purwodadi)
217	Bangunan Gedung.Bangunan Rumah Sakit Hewan	1	unit	Baik (Puskesmas Geyer)
218	Bangunan Gedung.Bangunan Rumah Sakit Hewan	1	unit	Baik (Puskesmas Grobogan)
219	Bangunan Gedung.Bangunan Gudang Arsip	1	unit	BAIK (Bangunan Gedung Arsip DEPAN MUSHOLA)
220	Bangunan Gedung.Bangunan Rumah Sakit Hewan	1	unit	Baik (Puskesmas Godong)
221	Bangunan Gedung.Bangunan Rumah Sakit Hewan	1	unit	Baik (Puskesmas Gabus)
222	Bangunan Gedung.Bangunan Rumah Sakit Hewan	1	unit	Baik (Puskesmas Kapung)
223	Bangunan Gedung.Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	unit	Baik (Mushola Rph Getas Rejo)
224	Bangunan Gedung.Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1	unit	Baik (Gedung Mes Sekolah Lapangan)



No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Keterangan atau Kondisi
225	Bangunan Gedung.Bangunan Kolam/Bak Ikan	1	unit	Baik (Kolam Ikan Komplek Bbi Karangrayung)
226	Bangunan Gedung.Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	unit	Baik (Gudang Pakan Ternak)
227	Bangunan Gedung.Lain-Lain	1	unit	Baik (Gedung Rawat Inap Hewan)
228	Bangunan Gedung.Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1	unit	Baik (Gedung Sekolah Lapang Peternakan Perikanan)
229	Bangunan Gedung.Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	unit	Baik (Mushola Kantor)
230	Bangunan Gedung.Gedung Pemotong Hewan Permanen	1	unit	Baik (Penggurukan Rph)
231	Bangunan Gedung.Gedung Pemotong Hewan Permanen	1	unit	Baik (Penataan Lingkungan Rph)
232	Bangunan Gedung.Bangunan Kolam/Bak Ikan	1	unit	Rusak Ringan (Komlek Bbi Karangrayung)
233	Bangunan Gedung.Halaman/Paving	1	unit	Baik (Paving Halaman Disnakkan)
234	Bangunan Gedung.Kanopi	1	unit	Baik (Kanopi Antara Sekolah Lapang Dan Mes)
235	Tugu Titik Kontrol/Pasti.Pagar Permanen	1	unit	Baik (Pagar Belakang Disnakkan)
236	Bangunan Gedung.Bangunan Kandang Hewan/Ternak Semi Permanen	1	unit	RUSAK RINGAN (Bangunan Kandang Kayu/PORTABEL )
237	Bangunan Gedung.Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	unit	Baik (Bangunan Gudang Obat Puskesmas Purwodadi)
238	Bangunan Gedung.Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	unit	Baik (Gudang Bbi Karangrayung)
239	Bangunan Gedung.Bangunan Rumah Sakit Hewan	1	unit	Baik (Gedung Rumah Sakit Hewan Puskesmas Karangrayung)
240	Bangunan Gedung.Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	1	unit	Baik (Lapangan Tennis)
241	Bangunan Gedung.Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan Permanen	1	unit	Baik (Gedung Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan Rph)
242	Bangunan Gedung.Bangunan Kolam/Bak Ikan	1	unit	Baik (Kolam Ikan Bidang Perikanan)
243	Bangunan Gedung.Gedung Pos Jaga Permanen	1	unit	Baik (Rumah Jaga Bbi Karangrayung)
244	Bangunan Air.Sumur Artetis	1	unit	(Sumur Artetis) Disnakkan
245	Bangunan Air.Saluran Pengumpul Air Buangan Domestik	1	unit	(Pembuatan Saluran Air) DISNAKKAN
246	Jalan Dan Jembatan.Jalan Khusus Kompleks	1	unit	(Jalan Produksi) Disnakkan
247	Instalasi.Sumur Gali (Sgl)	1	unit	Air Minum Bawah Tanah Komplek Rph Getasrejo
248	Instalasi.Instalasi Pengolahan Sampah Organik Sistem Penimbunan	1	unit	Instalasi Pengolahan Limbah Padat Rph
249	Instalasi.Instalasi Pengolahan Sampah Organik Sistem Penimbunan	1	unit	Bangunan Ipal, (Kolam) Pembuangan Kotoran



No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Keterangan atau Kondisi
250	Jalan Dan Jembatan.Jalan Khusus Kompleks	1	unit	Pengaspalan Jalan Masuk Dan Halaman Rph Getasrejo
251	Bangunan Air.Bangunan Got Miring	1	unit	Drainase / Saluran Jalan Lingkungan Rph Getasrejo
252	Instalasi.Instalasi Air Tanah Dangkal Kapasitas Kecil	1	unit	Instalasi Air Puskesmas Geyer
253	Instalasi.Instalasi Air Tanah Dangkal Kapasitas Kecil	1	unit	Puskesmas Wirosari

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan, 2025

Berdasarkan analisis kebutuhan sarana dan prasarana Dinas Peternakan dan Perikanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan (2025-2029) adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6**

**Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Jangka Waktu 5 Tahun (2025-2029)**

No	Nama Barang	Satuan	Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Sarana dan prasarana inseminasi buatan	Paket			1			
2	Sarana dan prasarana Puskesmas	Paket		1			1	
3	Sarana pengambilan sampel pakan	Paket			1			
4	Sarana dan prasarana BBI	Paket			1		1	
5	Sarana dan prasarana RPH							
6	Kendaraan operasional roda dua	Paket			1			1
7	Kendaraan operasional roda empat	Paket				1		
8	Personal Computer / Laptop / Notebook	Paket		1	1	1	1	1
9	Printer dan alat pemindai / Scanner	Paket		1	1	1	1	1
10	Bangunan Puskesmas	Unit		9		9		9
11	Mabelair	Paket			1		1	
12	Bangunan RPH	Unit		1		1		1
13	Bangunan Kolam BBI	Unit			2		2	
14	Sarana prasarana komunikasi (telepon dan internet)	Paket	3	3	3	3	3	3
15	Sound System	Paket		1				
16	Sarana Prasarana Telekonferen	Paket		1				
17	Alat Ukur Ternak	Paket		1			1	
18	Alat Uji Kualitas Air	Paket		1			1	



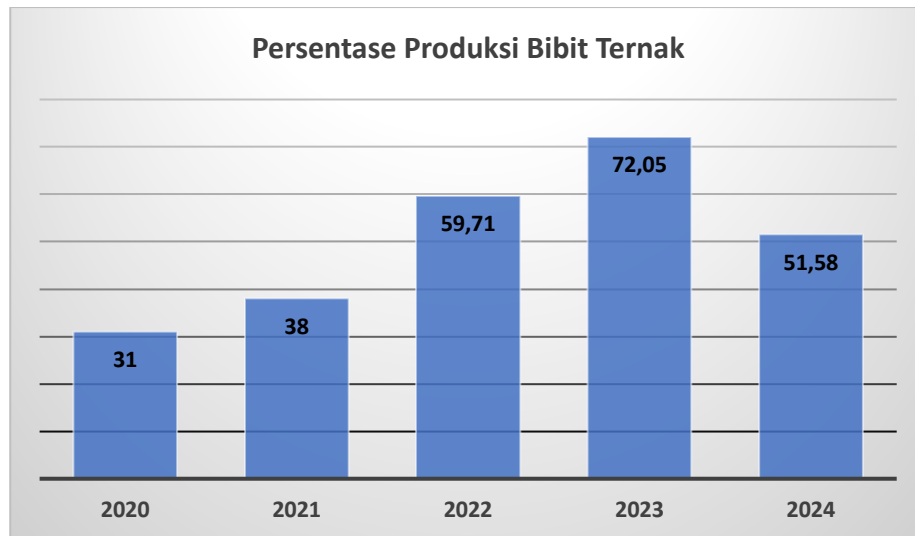
No	Nama Barang	Satuan	Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
19	Alat Uji Kualitas Pangan Asal Ternak / Ikan	Paket			1		1	

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan, 2025

### 2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan

Kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan memiliki peran krusial dalam memastikan terlaksananya tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya secara optimal. Pelayanan yang berkualitas mencerminkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta tingkat akuntabilitas birokrasi kepada masyarakat. Pencapaian target program dan kegiatan sangat bergantung pada seberapa baik Dinas mampu menjalankan fungsinya sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. Berikut dijabarkan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan tahun 2020-2024.

Produksi bibit ternak yang baik memerlukan perencanaan yang matang dan seleksi indukan unggul berdasarkan performa genetik dan kesehatan yang optimal. Pemilihan induk jantan dan betina harus didasarkan pada catatan silsilah, produktivitas, serta daya adaptasi terhadap lingkungan setempat. Perawatan indukan perlu dilakukan secara intensif dengan pemberian pakan bergizi, manajemen kandang yang bersih, dan pemantauan kesehatan secara rutin. Upaya ini bertujuan untuk menghasilkan bibit yang sehat, kuat, dan memiliki potensi genetik unggul guna mendukung peningkatan produktivitas peternakan. Capaian persentase produksi bibit ternak di Kabupaten Grobogan selama tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif. Capaian tertinggi terjadi di tahun 2023 yaitu sebesar 72,05%, namun tahun 2024 menurun menjadi 51,58%. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



**Gambar 2.2. Persentase Produksi Bibit Ternak di Kabupaten Grobogan**

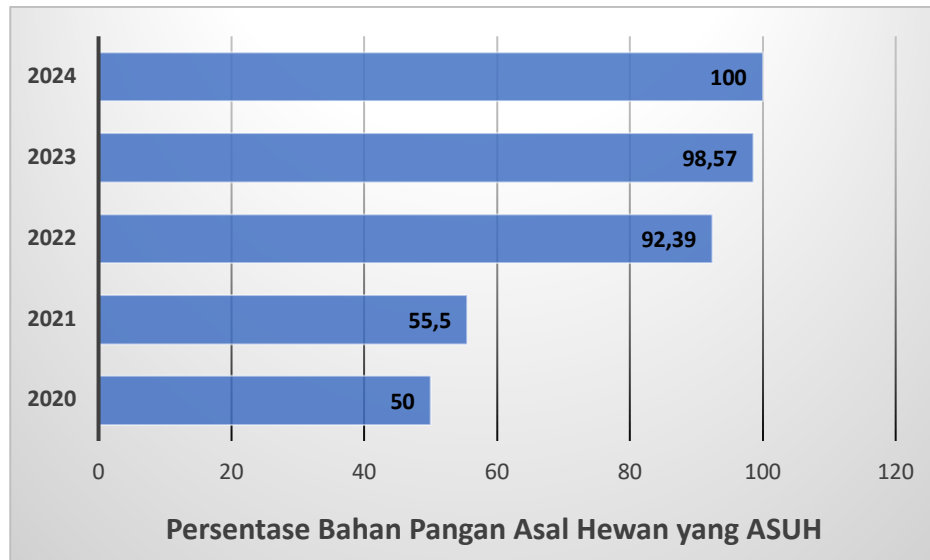
Bahan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) merupakan syarat penting untuk menjamin mutu konsumsi masyarakat. Keamanan pangan ditentukan oleh bebasnya bahan dari cemaran biologis, kimia, maupun fisik yang dapat membahayakan kesehatan. Kesehatan bahan pangan ditunjukkan melalui kandungan gizi yang baik serta tidak mengalami kerusakan selama proses penanganan dan distribusi. Keutuhan berarti bahan pangan tidak mengalami pengurangan komponen penting atau pencampuran dengan bahan lain yang tidak seharusnya. Kehalalan mencakup proses penyembelihan hingga penanganan pascapanen yang sesuai dengan kaidah syariat.

Pengawasan terhadap seluruh rantai produksi mulai dari peternakan, penyembelihan, hingga distribusi sangat menentukan terpenuhinya prinsip ASUH. Pelatihan terhadap pelaku usaha dan penguatan regulasi menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas bahan pangan asal hewan. Sertifikasi halal dan standar keamanan pangan wajib dipenuhi untuk menjamin bahwa produk yang dikonsumsi masyarakat memenuhi aspek kesehatan dan keagamaan. Konsumsi bahan pangan yang ASUH mendukung terciptanya masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi.

Capaian persentase bahan pangan asal hewan yang ASUH di Kabupaten Grobogan tahun 2020-2024 sudah sangat baik. Tren capaiannya setiap tahun cenderung meningkat, bahkan di tahun 2024 sudah mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar produk hewani yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan. Tingkat keberhasilan ini mencerminkan



efektivitas pengawasan, pembinaan pelaku usaha, serta kesadaran konsumen terhadap pentingnya mutu pangan. Ketersediaan produk yang ASUH turut mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat dan menjamin keamanan produk pangan asal hewan.



**Gambar 2.3. Persentase Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH di Kabupaten Grobogan**

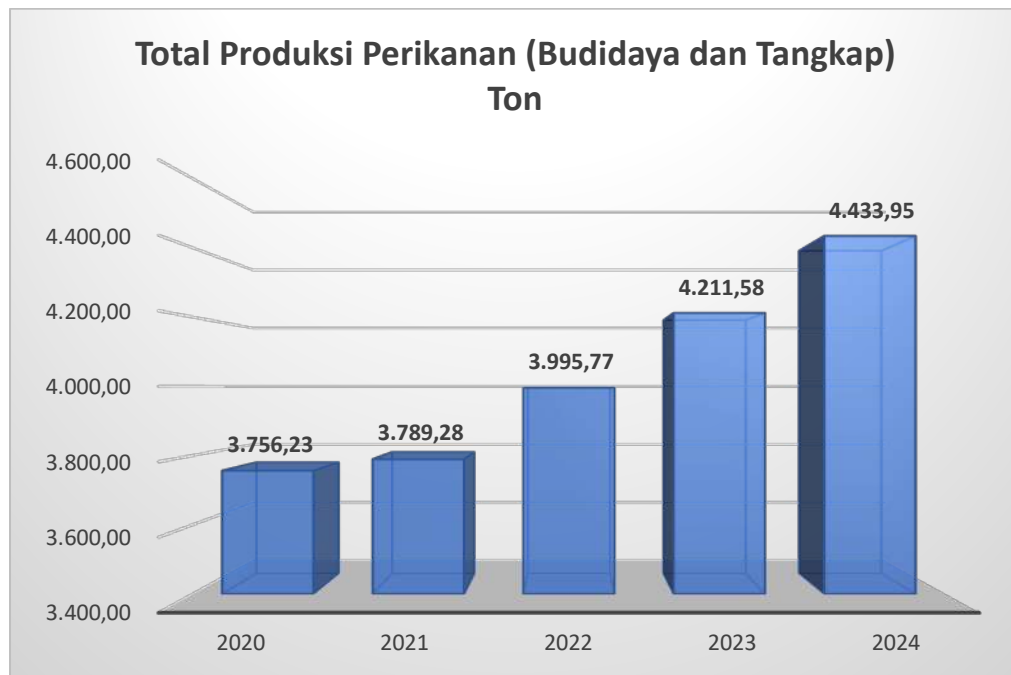
Terkait urusan kelautan dan perikanan, capaian kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan salah satunya dapat dilihat dari indikator jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya), serta jumlah produksi produk olahan ikan. Berdasarkan data tahun 2020-2024, total produksi perikanan di Kabupaten Grobogan cenderung meningkat stabil setiap tahun.

Produksi perikanan tangkap yang baik bergantung pada pengelolaan sumber daya (sungai, danau, waduk, rawa) secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Penangkapan ikan harus memperhatikan musim, ukuran, dan jenis ikan agar tidak mengganggu keseimbangan ekosistem. Penggunaan alat tangkap ramah lingkungan menjadi keharusan untuk mencegah kerusakan habitat ikan.

Produksi perikanan budidaya yang baik memerlukan pemilihan benih unggul, manajemen pakan yang efisien, serta pengelolaan kualitas air secara optimal. Penataan sistem budidaya harus memperhatikan kepadatan tebar, biosekuriti, dan sanitasi lingkungan agar ikan tumbuh sehat dan produktif. Penggunaan teknologi seperti sistem resirkulasi atau bioflok mampu meningkatkan efisiensi dan ramah lingkungan. Pengawasan terhadap penggunaan obat-obatan dan pakan harus dilakukan untuk



menjamin keamanan produk hasil budidaya. Hasil produksi yang berkualitas akan mendukung ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan pembudidaya, dan memperkuat perekonomian lokal.



**Gambar 2.4. Total Produksi Perikanan di Kabupaten Grobogan**

Berikut dijabarkan secara lebih detail terkait jumlah produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Kabupaten Grobogan selama tahun 2020-2024. Data tangkapan yang tercatat secara baik membantu dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan berbasis bukti.



**Gambar 2.5. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Grobogan**

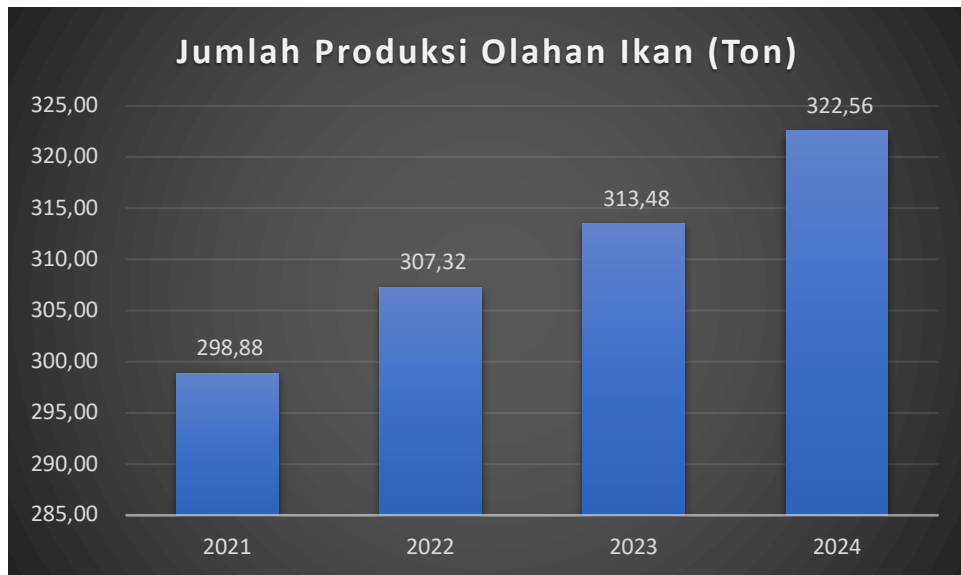


**Gambar 2.6. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Grobogan**

Indikator berikutnya yang mencerminkan kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan yaitu jumlah produksi produk olahan ikan. Produksi olahan ikan di Kabupaten Grobogan dari tahun 2021-2024 paling tinggi mencapai angka 322,56 ton.

Produksi produk olahan ikan memerlukan bahan baku yang segar, bersih, dan bebas dari cemaran. Pemilihan ikan harus dilakukan dengan cermat berdasarkan ukuran, tekstur daging, dan aroma untuk menjamin kualitas hasil akhir. Proses penyimpanan sebelum pengolahan harus memenuhi standar suhu dan kelembapan guna menghindari pembusukan. Penanganan yang tepat sejak pascapanen menjadi dasar penting dalam menjaga mutu dan keamanan produk.

Proses pengolahan harus mengikuti prinsip sanitasi dan higienitas yang ketat. Penggunaan peralatan yang bersih, lingkungan kerja yang tertata, serta tenaga kerja yang memahami prosedur kebersihan menjadi penentu utama mutu produk. Penerapan standar mutu seperti Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) atau HACCP memastikan setiap tahap produksi berjalan aman dan efisien. Pemilihan metode pengolahan seperti pengasapan, pengeringan, pengalengan, atau pembekuan harus disesuaikan dengan jenis produk yang diinginkan serta target pasarnya.



**Gambar 2.7. Jumlah Produksi Produk Olahan Ikan di Kabupaten Grobogan**

Capaian kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan secara detail, dan hasil evaluasi atas indikator pelayanan tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 2.7 dan 2.8 di bawah ini.



Tabel 2.7

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja (IKK)	Satuan	Realisasi Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>IKK</b>						
1	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-13,55	-3,36	318,1	-62,5	-1,78
2	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	%	104,00	100,00	100,09	100,12	100,03

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan

Tabel 2.8

Evaluasi Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian Kinerja			Persentase Capaian (%)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	5	6	7	11	12	13	15	16	17
1	Pertumbuhan Populasi ternak unggulan	%	2	2	2	7,71	0,97	1,49	385,5	48,5	74,5
2	Populasi ternak unggulan	AU	232.189	236.833	241.570	243.434,98	245.801	249.471,89	104,84	103,79	103,27

**RENSTRA 2025-2029****Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan**

No	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian Kinerja			Persentase Capaian (%)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	5	6	7	11	12	13	15	16	17
3	Pertumbuhan produksi perikanan	%	5,35	5,37	5,37	5,02	5,4	5,28	93,83	100,56	98,32
4	Produksi perikanan	Ton	3.992,17	4.206,50	4.432,50	3.995,87	4.211,58	4.433,95	100,09	100,12	100,03
5	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B	B	B	B	B	B	100	100	100
6	Nilai IKM Disnakkam	Nilai	B	B	B	B	B	B	100	100	100
7	Nilai SAKIP Disnakkam	Nilai	B	B	B	B	B	B	100	100	100
8	Persentase pemanfaatan sarana peternakan		100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase pemanfaatan prasarana peternakan	%	40	42	43	59,71	47,81	51,58	149,28	113,83	119,95
10	Persentase produksi bibit ternak	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase angka kesembuhan hewan	%	74	75	75	92,6	92,6	75	125,14	123,47	100
12	Persentase Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH	%	56	56,5	57	92,39	92,39	100	164,98	163,52	175,44
13	Persentase pemberian rekomendasi ijin unit usaha produksi peternakan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Persentase kelompok tani ternak terbina	%	60	65	70	59,16	59,16	53,47	98,6	91,02	76,39
15	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	1262	1325,5	1392,3	1264,677	578,31	1392,4	100,21	43,63	100,01
16	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	2730,17	2881	3040,2	2731,192	1440,028	3041,55	100,04	49,98	100,04
17	Jumlah produksi produk olahan ikan	ton	304,26	310,04	316,24	307,32	145,185	322,56	101,01	46,83	102

**RENSTRA 2025-2029****Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan**

No	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian Kinerja			Persentase Capaian (%)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	5	6	7	11	12	13	15	16	17
18	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
19	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan



#### **2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan**

Kelompok sasaran layanan Dinas Peternakan dan Perikanan meliputi berbagai pihak yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan sektor peternakan dan perikanan di daerah. Secara umum, sasaran utamanya adalah para peternak dan pembudidaya ikan, baik skala kecil, menengah, maupun besar, yang membutuhkan pembinaan, bantuan teknis, serta fasilitas pendukung untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas usaha mereka. Selain itu, kelompok sasaran juga mencakup nelayan, pengolah hasil ternak dan ikan, Petugas Inseminasi Buatan atau Inseminator, Medik dan Paramedik Kesehatan Hewan Mandiri, Klinik Hewan Mandiri, Perusahaan Pakan Ternak dan Perusahaan Obat Ternak.

#### **2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan**

Mitra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan dalam memberi pelayanan kepada masyarakat terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Selain itu Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan juga bermitra dengan Paguyuban Inseminator, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), Asosiasi Pengusaha Pakan Ternak dan Asosiasi Pengusaha Obat Hewan.

#### **2.1.6. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah**

Badan usaha milik daerah (BUMD) yang mendukung sub sektor peternakan dan sektor perikanan antara lain Perbankan (BKK dan Bank Jateng). Perbankan memiliki peran penting dalam penyediaan modal dan peningkatan akses ke pembiayaan sehingga memberikan nilai tambah dan daya saing terhadap produk usaha peternakan dan perikanan.

#### **2.1.7. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah**

Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan yaitu Kerjasama dengan daerah lain dalam rangka penanganan dan pemberantasan penyakit hewan menular.



## 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

### 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan

Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/ capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Berdasarkan diskusi melalui *forum group discussion* (FGD) serta masukan dan saran dari Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kecamatan, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan mencatat ada beberapa permasalahan penting yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas ternak di masyarakat. Hal ini disebabkan belum meratanya penggunaan bibit ternak unggul, skala usaha peternakan terbatas, belum tersedianya pakan baik dari segi kuantitas maupun kualitas secara kontinyu, belum diterapkannya cara budidaya ternak yang baik (keterbatasan SDM Petani Peternak), penurunan daya tarik beternak bagi generasi muda, dan belum diterapkannya penggunaan teknologi.
2. Belum meratanya sarana dan prasarana peternakan di masyarakat, terbatasnya layanan dan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan, serta belum optimalnya layanan Pusat Kesehatan.
3. Ancaman penyakit hewan menular strategis dan zoonosis. Mewabahnya penyakit LSD (*Lumpy Skin Disease*) dan PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) sehingga mempengaruhi kegiatan Pembibitan melalui IB (Inseminasi Buatan).
4. Tingginya intensitas lalu lintas hewan dan produk asal hewan yang masuk maupun keluar Kabupaten Grobogan. Hal ini berpotensi terjadinya penularan penyakit hewan. Saat ini kewenangan lalu lintas hewan berada di Pemerintah Provinsi, sedangkan Pemerintah Daerah tidak mempunyai Pos Lalu Lintas Hewan, sehingga pengawasan hanya dilakukan di pasar hewan.
5. Belum banyak produk peternakan yang mempunyai NKV (Nomor Kontrol Veteriner). NKV merupakan sertifikat resmi yang diberikan oleh pemerintah (melalui Dinas Peternakan atau instansi berwenang) kepada unit usaha produk hewan yang telah memenuhi persyaratan higienis dan sanitasi sebagai penjaminan keamanan pangan.
6. Kurangnya tenaga dan kompetensi medik dan paramedik kesehatan hewan.
7. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat peternak dan terbatasnya tenaga dan kompetensi penyuluh peternakan.



8. Sulitnya mempertahankan produksi perikanan tangkap karena alih adanya fungsi lahan dan pencarian ikan secara berlebihan. Kabupaten Grobogan merupakan kabupaten yang tidak punyai Laut sehingga perikanan tangkap bergantung kepada perairan darat (sungai, waduk, dan embung).
9. Belum optimalnya produksi perikanan budidaya. Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya minat dan keterbatasan SDM dan kompetensi pembudidaya ikan, adanya risiko bencana banjir yang sering terjadi, kurangnya penerapan teknologi dan terbatasnya akses permodalan.
10. Belum optimalnya produksi produk olahan hasil perikanan. Minimnya keterampilan dan pengetahuan pelaku usaha dalam teknik pengolahan hasil perikanan. Sarana dan Prasarana berupa fasilitas pengolahan masih terbatas atau tidak memadai sehingga standar mutu dan keamanan pangan masih rendah.

### **2.2.2. Isu Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan**

Isu Strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Permasalahan atau isu strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan secara umum adalah sebagai berikut:

1. Produksi dan produktivitas ternak belum optimal.
2. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana peternakan dan perikanan di masyarakat belum optimal.
3. Belum optimalnya penanggulangan, pengendalian serta penanganan penyakit menular pada ternak.
4. Belum optimalnya pengawasan terhadap peredaran dan lalu lintas hewan dan produk asal hewan.
5. Minimnya unit usaha produk asal hewan yang telah memenuhi persyaratan higienis dan sanitasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Belum optimalnya pemberdayaan kelompok peternakan dan perikanan
7. Belum optimalnya produksi dan pemanfaatan potensi perikanan budidaya.
8. Belum optimalnya pengolahan hasil perikanan.



Tabel 2.9

Perumusan Isu Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	ISU KLHS yang Relevan dengan PD	ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			ISU Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
<p><b>Potensi Lahan untuk pengembangan peternakan yang luas.</b> Kawasan Peternakan memiliki luas kurang lebih 78 hektar meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kecamatan Godong;</li> <li>b. Kecamatan Karangrayung;</li> <li>c. Kecamatan Grobogan;</li> <li>d. Kecamatan Klambu;</li> <li>e. Kecamatan Wirosari;</li> <li>f. Kecamatan Penawangan;</li> <li>g. Kecamatan Tegowanu;</li> <li>h. Kecamatan Toroh; dan</li> </ul>	<p><b>Belum optimalnya produksi dan produktivitas ternak di masyarakat.</b> Hal ini disebabkan belum meratanya penggunaan bibit ternak unggul, skala usaha peternakan terbatas, belum tersedianya pakan baik dari segi kuantitas maupun kualitas secara kontinyu, belum diterapkannya cara budidaya ternak yang baik (keterbatasan SDM Petani Peternak), penurunan daya tarik beternak bagi generasi muda, dan belum diterapkannya penggunaan teknologi</p>	<p>Ancaman peningkatan risiko bencana karena dampak perubahan iklim, polusi dan pencemaran lingkungan serta berkurangnya keanekaragaman hayati.</p> <p><b>Dalam sektor peternakan,</b> kenaikan suhu ekstrem mempengaruhi fisiologi hewan, menyebabkan stres panas (heat stress) yang berdampak pada penurunan konsumsi pakan, pertumbuhan yang lambat, penurunan produksi susu,</p>	<p><b>Perubahan Iklim</b> Pemanasan global tetap menjadi tantangan besar yang perlu diatasi secara luas dan berkelanjutan. Pertumbuhan industri dan meningkatnya jumlah populasi turut berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca, yang pada akhirnya menyebabkan kenaikan suhu global. Dampak dari perubahan iklim ini akan berpengaruh signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan di bumi, termasuk ekosistem, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.</p>	<p><b>Krisis Lingkungan</b> Krisis lingkungan juga akan menjadi ancaman bagi keberlanjutan pembangunan Kabupaten Grobogan, terutama dalam hal kelestarian sumber daya alam dan perubahan iklim. Kabupaten ini masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan sumber daya air dan keberlanjutan pertanian akibat perubahan pola curah hujan serta potensi bencana seperti banjir dan kekeringan. Data dari BMKG menunjukkan bahwa perubahan iklim telah berdampak pada musim tanam dan hasil panen, yang pada akhirnya mempengaruhi stabilitas ekonomi petani.</p>	<p><b>Ketahanan pangan yang berkelanjutan.</b> Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi semua orang dan daerah/wilayah yang tercermin dari ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan. Ketersediaan pangan yang bersumber dari pertanian, peternakan, dan perikanan harus dapat memenuhi kebutuhan penduduk di suatu wilayah dalam jangka panjang dan lintas generasi. Ketersediaan pangan akan dapat dicapai dan dijamin keberlanjutannya jika pembangunan memperhatikan sarana prasarana pertanian,</p>	<p>Produksi dan produktivitas ternak belum optimal</p> <p>Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana peternakan dan perikanan di masyarakat belum optimal</p> <p>Belum optimalnya penanggulangan, pengendalian serta penanganan penyakit menular pada ternak.</p>



Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	ISU KLHS yang Relevan dengan PD	ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			ISU Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
i. Kecamatan Ngaringan.	<p><b>Belum meratanya sarana dan prasarana peternakan di masyarakat,</b> terbatasnya layanan dan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan, serta belum optimalnya layanan Pusat Kesehatan</p> <p><b>Ancaman penyakit hewan menular strategis dan zoonosis.</b> Mewabahnya penyakit LSD (Lumpy Skin Disease) dan PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) sehingga mempengaruhi kegiatan Pembibitan melalui IB (Inseminasi Buatan).</p>	<p>kualitas daging, dan gangguan reproduksi. Suhu tinggi dan kelembaban ekstrem juga meningkatkan prevalensi penyakit zoonosis dan infeksi parasit, mempercepat penyebaran penyakit seperti PMK (Penyakit Mulut dan Kuku), LSD (Lumpy Skin Disease), antraks, dan mastitis. Selain itu, kekeringan berkepanjangan mengurangi ketersediaan rumput dan air minum, mengakibatkan meningkatnya</p>	<p>Selain itu, intensitas bencana alam seperti banjir dan kekeringan juga meningkat, sebagaimana tercatat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dalam lima tahun terakhir, kejadian banjir dan kekeringan di Grobogan menyebabkan kerusakan infrastruktur, menurunkan hasil pertanian, dan meningkatkan beban ekonomi masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah rawan bencana.</p>		<p>konversi lahan/alih fungsi lahan yang terkendali, peningkatan produktivitas, diversifikasi pangan, dan up-skilling SDM pertanian.</p>	



Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	ISU KLHS yang Relevan dengan PD	ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			ISU Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	<p><b>Tinginya intensitas lalu lintas hewan dan produk asal hewan yang masuk maupun keluar Kabupaten Grobogan.</b> Hal ini berpotensi terjadinya penularan penyakit hewan. Saat ini kewenangan lalu lintas hewan berada di Pemerintah Provinsi, sedangkan Pemerintah Daerah tidak mempunyai Pos Lalu Lintas Hewan, sehingga pengawasan hanya dilakukan di pasar hewan</p>	<p>angka kematian ternak dan beban biaya produksi bagi peternak.</p> <p><b>Di sektor perikanan,</b> perubahan iklim memicu pemanasan air laut, danau, dan sungai, yang berakibat pada perubahan habitat dan pola migrasi ikan, menurunnya produktivitas budidaya, serta meningkatnya risiko kematian</p>				Belum optimalnya pengawasan terhadap peredaran dan lalu lintas hewan dan produk asal hewan.



Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	ISU KLHS yang Relevan dengan PD	ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			ISU Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	<p><b>Belum banyak produk peternakan yang mempunyai NKV (Nomor Kontrol Veteriner).</b></p> <p>NKV merupakan sertifikat resmi yang diberikan oleh pemerintah (melalui Dinas Peternakan atau instansi berwenang) kepada unit usaha produk hewan yang telah memenuhi persyaratan higienis dan sanitasi sebagai penjaminan keamanan pangan</p>	<p>massal ikan akibat penurunan kadar oksigen terlarut. Pemanasan juga mempercepat proliferasi penyakit ikan dan wabah alga berbahaya (algal blooms), yang dapat menghancurkan populasi budidaya dalam waktu singkat. Selain itu, perubahan iklim memperbesar risiko bencana seperti banjir rob,</p>				<p>Minimnya tempat/unit usaha produk asal hewan yang telah memenuhi persyaratan higienis dan sanitasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Belum optimalnya pemberdayaan kelompok peternakan dan perikanan</p>



Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	ISU KLHS yang Relevan dengan PD	ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			ISU Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Kurangnya tenaga dan kompetensi medik dan paramedik kesehatan hewan</p> <p>Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat peternak dan terbatasnya tenaga dan kompetensi penyuluh peternakan</p>	<p>dan abrasi, yang dapat merusak tambak, keramba jaring apung, sarana produksi, serta infrastruktur pendukung sektor perikanan.</p>				
<p><b>Kawasan untuk perikanan di Kabupaten Grobogan arahnya adalah perikanan budidaya.</b> Adapun komoditas perikanan yang ada yaitu</p>	<p><b>Sulitnya mempertahankan produksi perikanan tangkap.</b> Hal ini dikarenakan adanya alih fungsi lahan dan pencarian ikan secara berlebihan. Kabupaten Grobogan merupakan kabupaten yang tidak punyai</p>		<p><b>Demografi dan Urbanisasi</b> Sebagai wilayah penyangga, Grobogan berpotensi menjadi alternatif bagi penduduk yang mencari hunian lebih terjangkau dan lingkungan yang lebih tenang</p>	<p><b>Pergeseran struktur kelas masyarakat,</b> yang ditandai dengan pertumbuhan kelas menengah dan ketimpangan ekonomi, juga berpengaruh terhadap pola konsumsi dan peluang usaha di daerah. Jika tidak diimbangi dengan</p>		<p>Belum optimalnya produksi dan pemanfaatan potensi perikanan budidaya.</p>



Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	ISU KLHS yang Relevan dengan PD	ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			ISU Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
<p>mujahir, nila, tawes, gurame, dan lele. Kawasan peruntukan perikanan ini meliputi budidaya kolam, sungai, dan waduk yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten.</p>	<p>Laut sehingga perikanan tangkap bergantung kepada perairan darat (sungai, waduk, dan embung)</p> <p><b>Belum optimalnya produksi perikanan budidaya.</b> Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya minat dan keterbatasan SDM dan kompetensi pembudidaya ikan, adanya risiko bencana banjir yang sering terjadi, kurangnya penerapan teknologi dan terbatasnya akses permodalan</p>		<p>dibandingkan dengan Kota Semarang dan Kota Salatiga yang semakin padat. Fenomena urban sprawl atau penyebaran kota yang tidak terencana dapat menyebabkan perluasan wilayah perkotaan ke daerah sekitar, termasuk Grobogan. Hal ini dapat berdampak pada perubahan penggunaan lahan (alih fungsi lahan), peningkatan kebutuhan infrastruktur, dan layanan publik. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Grobogan perlu mempersiapkan perencanaan tata ruang yang adaptif serta pengembangan infrastruktur yang memadai untuk</p>	<p>pengembangan ekonomi inklusif, hal ini dapat memperlebar jurang ketimpangan sosial.</p>		



Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	ISU KLHS yang Relevan dengan PD	ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			ISU Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
			mengakomodasi pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang mungkin terjadi.			
	<b>Belum optimalnya pengolahan hasil perikanan.</b> Minimnya keterampilan dan pengetahuan pelaku usaha dalam teknik pengolahan hasil perikanan. Sarana dan Prasarana berupa fasilitas pengolahan masih terbatas atau tidak memadai sehingga standar mutu dan keamanan pangan masih rendah.					Belum optimalnya pengolahan hasil perikanan.



## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1. Tujuan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan 2025-2029**

Tujuan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 merupakan kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Dinas Peternakan dan Perikanan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau memperhatikan sasaran RPJMD. Tujuan yang dirumuskan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan yaitu: **“Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi di Sektor Peternakan dan Perikanan”**, dengan indikator yaitu Pertumbuhan PDRB (ADHK) Sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan.

Sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan. Sasaran yang dirumuskan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan yaitu:

1. **Meningkatnya Produksi Komoditas Peternakan**, dengan indikator: Produksi Daging; dan Produksi Telur.
2. **Meningkatnya Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan**, dengan indikator: Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota; dan Angka Konsumsi Ikan.
3. **Meningkatnya Akuntabilitas, Pengelolaan Risiko dan Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah**, dengan indikator: Nilai SAKIP Disnakkan; Nilai IKM Disnakkan; dan Nilai Manajemen Risiko Disnakkan.



Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun						
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ket.
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1.2 Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi di Sektor Pertanian	Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi di Sektor Peternakan dan Perikanan		Pertumbuhan PDRB (ADHK) Sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan	%	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	
NSPK (sesuai pembagian urusan dalam UU 23 Tahun 2014): Sarana Pertanian; Prasarana Pertanian; Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;		Meningkatnya Produksi Komoditas Peternakan	Produksi Daging (Sapi, Kambing, Domba, dan Unggas)	Ton	1.959,81	2.155,80	2.371,38	2.608,51	2.869,36	3.156,30	
			Produksi Telur	Ton	1.019,00	1.047,00	1.071,00	1.094,00	1.118,00	1.142,00	
		Meningkatnya Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	Ton	4.570,50	4.576,95	4.611,35	4.645,15	4.677,85	4.709,94	
			Angka Konsumsi Ikan	Kg/kapita/ tahun	23,05	23,78	24,56	25,14	25,53	25,85	



NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun						
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ket.
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian; Perizinan Usaha Pertanian.		<b>Meningkatnya Akuntabilitas, Pengelolaan Risiko dan Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah</b>	Nilai SAKIP Disnakkan	Indeks	72	73	74	75	76	77	
			Nilai IKM Disnakkan	Indeks	78,5	79	79,5	80	81,5	82	
			Nilai Manajemen Risiko Disnakkan	Indeks	3,275	3,300	3,325	3,350	3,375	3,400	



Penahapan pembangunan merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2

**Penahapan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan  
Tahun 2025-2029**

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Penguatan penyediaan sarana dan prasarana dasar peternakan dan perikanan;	Pengembangan kapasitas SDM pelaku utama dan pelaku usaha; Pengembangan model budidaya dan teknologi pakan unggul; Pengembangan akses pelayanan publik digital	Akselerasi kelembagaan kelompok tani dan nelayan; Akselerasi distribusi bibit, pakan, dan vaksin; Akselerasi sistem logistik ikan dan produk peternakan	Peningkatan sistem pemasaran hasil peternakan dan perikanan; Peningkatan program konsumsi ikan dan protein hewani; Peningkatan integrasi layanan publik	Pemantapan produksi melalui hilirisasi dan diversifikasi produk; Penguatan pelayanan publik berbasis teknologi; Penguatan sinergi lintas sektor

### 3.2. Strategi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2029

Strategi Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan. Rumusan Strategi yang disusun yaitu:

1. Meningkatkan produksi ternak melalui penerapan teknik budidaya yang baik dengan memberdayakan kelompok tani ternak, penyediaan sarana dan prasarana produksi peternakan, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi peternakan.
2. Meningkatkan produksi hasil perikanan dengan pemberdayaan dan peningkatan kompetensi nelayan dan pembudidaya ikan, dan penyediaan sarana dan prasarana perikanan.
3. Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.



### 3.3. Arah Kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2029

Arah Kebijakan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD, serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan. Rumusan arah kebijakan yang dibuat yaitu:

1. Pengembangan pakan berkualitas dan *Good Feeding Practice* (GFP);
2. Penyediaan benih dan bibit ternak berkualitas melalui penerapan *Good Breeding Practice* (GBP);
3. Perluasan cakupan pelayanan IB dan peningkatan kompetensi inseminator lapangan;
4. Peningkatan cakupan vaksinasi dan pemantauan penyakit hewan secara berkala;
5. Pelatihan penyusunan ransum pakan dengan memanfaatkan bahan pakan lokal;
6. Fasilitasi pembentukan, legalisasi, dan pembinaan kelompok serta koperasi peternakan;
7. Pelatihan teknik budidaya, manajemen pakan, kesehatan hewan, dan pengolahan hasil;
8. Sosialisasi dan pendampingan penggunaan alat dan teknologi tepat guna;
9. Pengembangan platform digital untuk edukasi dan konsultasi;
10. Pembangunan jejaring kemitraan melalui forum daring dan luring;
11. Pembangunan instalasi biogas dan pupuk organik dari limbah ternak;
12. Penyediaan alat dan mesin peternakan (alsintan) yang sesuai kebutuhan pelaku usaha;
13. Pelatihan teknis pengelolaan kandang, kesehatan hewan, dan pengolahan limbah;
14. Promosi dan fasilitasi penggunaan biogas, dan energi terbarukan;
15. Penguatan sistem surveilans, pelaporan, dan respons cepat penyakit hewan menular;
16. Pelaksanaan program vaksinasi massal dan distribusi vaksin yang merata;
17. Pengawasan higienitas, sertifikasi NKV (Nomor Kontrol Veteriner), dan pengujian rutin;
18. Sosialisasi penerapan biosekuriti, sanitasi, dan penanganan hewan yang baik;
19. Peningkatan kapasitas laboratorium untuk diagnosis cepat dan akurat;
20. Penyediaan dan rehabilitasi sarana tangkap, budidaya, dan infrastruktur pendukung;



21. Bantuan alat dan teknologi tepat guna untuk usaha perikanan tangkap dan budidaya;
22. Fasilitasi akses ke kredit usaha rakyat (KUR), koperasi, dan lembaga keuangan mikro;
23. Pelatihan teknis, pendampingan manajemen usaha, dan pelatihan pascapanen;
24. Penguatan kelembagaan kelompok, kemitraan usaha, dan akses pasar hasil perikanan;
25. Pelatihan teknis pengolahan, pengemasan, keamanan pangan, dan manajemen usaha;
26. Peningkatan kualitas SDM aparatur;
27. Pengembangan platform digital terpadu yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat;
28. Otomatisasi proses administrasi dan integrasi data antar instansi;
29. Pemanfaatan sistem informasi untuk pelaporan kinerja, *feedback* masyarakat, dan audit layanan.

Tabel 3.3

**Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan  
Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029**

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
1	2	3	4
1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan penggunaan sarana pertanian;</li> <li>2. Pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten/kota;</li> <li>3. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten/kota;</li> </ol>	Peningkatan kualitas pakan, kualitas bibit, inseminasi buatan, dan pengendalian kesehatan hewan untuk: - meningkatkan populasi ternak,	Pengembangan pakan berkualitas dan <i>Good Feeding Practice</i> (GFP); Penyediaan benih dan bibit ternak berkualitas melalui penerapan <i>Good Breeding Practice</i> (GBP); Perluasan cakupan pelayanan IB dan peningkatan kompetensi inseminator lapangan; Peningkatan cakupan vaksinasi dan pemantauan penyakit hewan secara berkala
2	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;</li> <li>5. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah kabupaten/kota;</li> </ol>	Mendorong pemanfaatan bahan pakan lokal dan alternatif sebagai substitusi pakan impor, serta adopsi teknologi pakan fermentasi, silase, dan pakan komplit	Pelatihan penyusunan ransum pakan dengan memanfaatkan bahan pakan lokal



No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
1	2	3	4
3	6. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain; 7. Pengembangan prasarana Pertanian; 8. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah kabupaten/kota;	Penguatan kelembagaan kelompok dan peningkatan kompetensi peternak mengenai teknik budidaya dan pemanfaatan teknologi peternakan, serta penyediaan platform digital untuk berbagi informasi dan inovasi teknologi peternakan.	Fasilitasi pembentukan, legalisasi, dan pembinaan kelompok serta koperasi peternakan; Pelatihan teknik budidaya, manajemen pakan, kesehatan hewan, dan pengolahan hasil; Sosialisasi dan pendampingan penggunaan alat dan teknologi tepat guna; Pengembangan platform digital untuk edukasi dan konsultasi; Pembangunan jejaring kemitraan melalui forum daring dan luring
4	9. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah kabupaten/kota; 10. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah kabupaten/kota serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah kabupaten/kota;	Penyediaan sarana dan prasarana peternakan dan kesehatan hewan, termasuk pembangunan biogas dari limbah ternak	Pembangunan instalasi biogas dan pupuk organik dari limbah ternak; Penyediaan alat dan mesin peternakan (alsintan) yang sesuai kebutuhan pelaku usaha; Pelatihan teknis pengelolaan kandang, kesehatan hewan, dan pengolahan limbah; Promosi dan fasilitasi penggunaan biogas, dan energi terbarukan
5	11. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah kabupaten/kota; 12. Penerapan dan Pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;	Peningkatan status kesehatan hewan (KESWAN) dan kesehatan masyarakat veteriner (KESMAVET) melalui optimalisasi: -pencegahan penyakit; -pengobatan dan rehabilitasi; -peningkatan kesejahteraan hewan; dan -pengawasan produk hewan.	Penguatan sistem surveilans, pelaporan, dan respons cepat penyakit hewan menular; Pelaksanaan program vaksinasi massal dan distribusi vaksin yang merata; Pengawasan higienitas, sertifikasi NKV (Nomor Kontrol Veteriner), dan pengujian rutin; Sosialisasi penerapan biosekuriti, sanitasi, dan penanganan hewan yang baik; Peningkatan kapasitas laboratorium untuk diagnosis cepat dan akurat
6	13. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan; 14. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota; 15. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah kabupaten/kota;	Peningkatan sarana prasarana dan pemberdayaan bagi pelaku usaha perikanan tangkap dan budidaya.	Penyediaan dan rehabilitasi sarana tangkap, budidaya, dan infrastruktur pendukung; Bantuan alat dan teknologi tepat guna untuk usaha perikanan tangkap dan budidaya; Fasilitasi akses ke kredit usaha rakyat (KUR), koperasi, dan lembaga keuangan mikro; Pelatihan teknis, pendampingan manajemen usaha, dan pelatihan pascapanen; Penguatan kelembagaan kelompok, kemitraan usaha, dan akses pasar hasil perikanan;
7	16. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan,	Peningkatan kompetensi, dan sarana pengolahan hasil perikanan bagi para pelaku usaha	Pelatihan teknis pengolahan, pengemasan, keamanan pangan, dan manajemen usaha



No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
1	2	3	4
	fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan; 17.Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.	Peningkatan kualitas pelayanan di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan	Peningkatan kualitas SDM aparatur; Pengembangan platform digital terpadu yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat; Otomatisasi proses administrasi dan integrasi data antar instansi; Pemanfaatan sistem informasi untuk pelaporan kinerja, <i>feedback</i> masyarakat, dan audit layanan



## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

4.1.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif.

Program, kegiatan, dan subkegiatan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 secara rinci ada pada Tabel 4.2. Program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinas Peternakan dan Perikanan yaitu pijakan penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan tahun 2030.

Program yang ditetapkan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan tahun 2025-2029 berjumlah total 10 program, yaitu:

#### **1. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN.**

**A. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan:**

- 1) Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
- 2) Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
- 3) Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan

**B. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan:**

- 1) Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
- 2) Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak

**C. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan:**

- 1) Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak



2) Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan

**D. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**, dengan subkegiatan:

1) Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

2) Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

## **2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN.**

**A. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian**, dengan subkegiatan:

1) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

2) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

3) Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas

4) Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan

**B. Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota**, dengan subkegiatan:

1) Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak

## **3. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER.**

**A. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**, dengan subkegiatan:

1) Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

**B. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**, dengan subkegiatan:

1) Pengawasan Peredaran Produk Hewan

2) Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya



**C. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan:**

- 1) Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
- 2) Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan

**D. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**

- 1) Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
- 2) Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
- 3) Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)
- 4) Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan

**4. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN.**

**A. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan:**

- 1) Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis
- 2) Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan

**5. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN.**

**A. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan, dengan subkegiatan:**

- 1) Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian
- 2) Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian

**6. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN.**

**A. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, dengan subkegiatan:**

- 1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
- 2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa



- 3) Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

## **7. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP.**

### **A. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota, dengan subkegiatan:**

- 1) Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
- 2) Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
- 3) Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

### **B. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan:**

- 1) Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
- 2) Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil

## **8. PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA.**

### **A. Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil, dengan subkegiatan:**

- 1) Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil

### **B. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, dengan subkegiatan:**

- 1) Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 5) Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat



**9. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN.**

**A. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil, dengan subkegiatan:**

- 1) Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko
- 2) Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

**B. Kegiatan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil, dengan subkegiatan:**

- 1) Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil

**C. Kegiatan Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil, dengan subkegiatan:**

- 1) Pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil

**10. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.**

**A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan subkegiatan:**

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

**B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan subkegiatan:**

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

**C. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan subkegiatan:**

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- 3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan



**D. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**, dengan subkegiatan:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 5) Penyediaan Bahan/Material
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**E. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, dengan subkegiatan:

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pengadaan Mebel
- 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**F. Kegiatan Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, dengan subkegiatan:

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**G. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, dengan subkegiatan:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pemeliharaan Mebel
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Berikut keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang dipilih guna mendukung ketercapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan.



Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan/Subkegiatan	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2 Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi di Sektor Pertanian	Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi di Sektor Peternakan dan Perikanan				Pertumbuhan PDRB (ADHK) Sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan		
		Meningkatnya Produksi Komoditas Peternakan			Produksi Daging (Sapi, Kambing, Domba, dan Unggas)		
					Produksi Telur		
			Meningkatnya produktivitas peternakan		Persentase produksi bibit ternak	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya genetik hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota	Jumlah kelompok pembudidaya Sapi Lokal di Kabupaten Grobogan	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	



RENSTRA 2025-2029

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan/Subkegiatan	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	
				Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	
				Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG hewan	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	
				<b>Meningkatnya mutu dan terjaminnya peredaran benih/bibit ternak dan pakan dalam daerah kabupaten/kota</b>	<b>Persentase Keberhasilan Inseminasi Buatan (IB)</b>	<b>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	
					<b>Persentase pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Ternak</b>		



RENSTRA 2025-2029

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan/Subkegiatan	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					<b>Persentase pengawasan Mutu dan Peredaran Pakan Ternak</b>		
				Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	
				Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	
				<b>Meningkatnya pengendalian dan pengawasan penyediaan serta peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak</b>	<b>Persentase Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak</b>	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	
				Terlaksananya Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	



RENSTRA 2025-2029

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan/Subkegiatan	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terawasinya Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	
				<b>Tersedianya benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dari daerah kabupaten/kota lain</b>	<b>Persentase penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dari daerah kabupaten/kota lain</b>	<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>	
				Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
				Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	



RENSTRA 2025-2029

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan/Subkegiatan	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya pemanfaatan prasarana peternakan		Persentase prasarana peternakan kondisi baik	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
				Tersedianya prasarana pertanian yang memadai untuk mendukung kegiatan pertanian	Jumlah pembangunan prasarana pertanian sampai dengan tahun n	Pembangunan Prasarana Pertanian	
				Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
				Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
				Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas	



RENSTRA 2025-2029

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan/Subkegiatan	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terbangun, terhabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	
				<b>Terlaksananya pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang dilestarikan serta dimanfaatkan</b>	<b>Persentase Peningkatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dikelola</b>	<b>Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	
				Terlaksananya Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	
			<b>Menurunnya Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan</b>		<b>Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular</b>	<b>Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	
					Persentase kesembuhan penyakit hewan		



RENSTRA 2025-2029

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan/Subkegiatan	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					<b>Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)</b>		
				<b>Terjaminnya kesehatan hewan dan terkendalinya daerah wabah penyakit hewan menular</b>	<b>Persentase Kasus Kejadian Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis yang Terkendali</b>	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota</b>	
				Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				<b>Terlaksananya pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan serta produk hewan</b>	<b>Persentase Hewan Keluar/Masuk Kabupaten yang Terawasi (Persentase Pengawasan Hewan dan Produk Hewan)</b>	<b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</b>	



RENSTRA 2025-2029

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan/Subkegiatan	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	
				Terkendalinya Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	
				<b>Meningkatnya pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner</b>	<b>Persentase Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner</b>	<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	
				Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	
				Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium	Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan	



RENSTRA 2025-2029

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan/Subkegiatan	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya penerapan dan pengawasan persyarakatan teknis Kesehatan masyarakat veteriner	Persentase fasilitasi unit usaha yang memenuhi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
				Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	
				Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	
				Terkelolanya Penerbitan Rekomendasi Pemasukan, Rekomendasi Pengeluaran, Sertifikat Veteriner dan SKKH/SKPH untuk HPM	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPKH HPM	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPKH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	



RENSTRA 2025-2029

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan/Subkegiatan	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	
			<b>Meningkatnya pengendalian dan penanganan bencana peternakan</b>		<b>Persentase Penanganan Bencana Peternakan</b>	<b>Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>	
				<b>Terkendalinya dampak bencana pertanian melalui penanggulangan yang efektif</b>	<b>Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	
				Tertanggulangnya Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	
				Terlaksananya Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan/Subkegiatan	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya fasilitasi pelayanan izin usaha pertanian		Persentase rekomendasi teknis Izin Usaha Peternakan yang Diterbitkan	Program Perizinan Usaha Pertanian	
				Terbitnya izin usaha produksi benih/bibit ternak, pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, dan rumah potong hewan	Persentase permohonan rekomendasi teknis yang terlayani	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	
				Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	
				Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	



RENSTRA 2025-2029

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan/Subkegiatan	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian petani		Persentase kelembagaan petani yang ditingkatkan	Program Penyuluhan Pertanian	
				Meningkatnya pengetahuan, sikap, dan keterampilan petani melalui penyuluhan pertanian	Jumlah Kelompok Tani Ternak yang Terbina	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
				Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
				Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	



RENSTRA 2025-2029

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan/Subkegiatan	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan			Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota		
					Angka Konsumsi Ikan		
			Meningkatnya produksi Perikanan Tangkap		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan tangkap	
				Meningkatnya pengelolaan penangkapan ikan di wilayah perairan darat kabupaten/kota	Persentase kelompok nelayan yang memperoleh sarana dan prasarana perikanan	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	



RENSTRA 2025-2029

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan/Subkegiatan	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	
				Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	
				Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
				<b>Peningkatan cakupan bina nelayan</b>	<b>Persentase Cakupan Bina Nelayan</b>	<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	
				Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	



RENSTRA 2025-2029

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan/Subkegiatan	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
			<b>Meningkatnya produksi Perikanan budidaya</b>		<b>Jumlah Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	
				<b>Meningkatnya kapasitas dan kemandirian Pembudidaya ikan kecil</b>	<b>Persentase Pembudidaya Ikan Air Tawar yang Dibina</b>	<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	
				Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	
				<b>Meningkatnya pengelolaan pembudidayaan ikan yang berkelanjutan dan berdaya saing</b>	<b>Persentase kelompok pembudidaya ikan yang memperoleh sarana dan prasarana budidaya</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	



RENSTRA 2025-2029

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan/Subkegiatan	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	



RENSTRA 2025-2029

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan/Subkegiatan	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	
			<b>Meningkatnya Produksi Hasil Olahan Perikanan</b>		<b>Jumlah Produksi Produk Olahan Ikan</b>	<b>Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	
				<b>Terbitnya tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil</b>	<b>Persentase Pertumbuhan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	
				Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	



RENSTRA 2025-2029

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan/Subkegiatan	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				<b>Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran ikan skala mikro dan kecil</b>	<b>Persentase Pelaku usaha perikanan (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan) yang memperoleh pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan</b>	<b>Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil</b>	
				Terlaksananya Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	



RENSTRA 2025-2029

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan/Subkegiatan	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terjaminnya mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan kecil	Persentase hasil pengolahan yang dilakukan pengujian mutu dan keamanannya	Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	
				Terlaksananya Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah sampel yang diuji mutu dan keamanannya	Pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	
		Meningkatnya Akuntabilitas, Pengelolaan Risiko dan kepuasan pelayanan Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Disnakkan		
					Nilai IKM Disnakkan		



RENSTRA 2025-2029

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan/Subkegiatan	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Nilai Manajemen Risiko Disnakkan		
			Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan		Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	
					Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah		
					Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko		
				Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	



RENSTRA 2025-2029

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan/Subkegiatan	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya dokumen perencanaan, laporan capaian kinerja, ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dan hasil koordinasi penyusunan laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				<b>Terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
				Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	



RENSTRA 2025-2029

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan/Subkegiatan	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya pakaian dinas dan atribut kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Tersedianya dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Meningkatnya pemahaman ASN melalui bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	

**RENSTRA 2025-2029****Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan**

<b>NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Outcome</b>	<b>Output</b>	<b>Indikator Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan/Subkegiatan</b>	<b>Program/Kegiatan /Subkegiatan</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
				Tersedianya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya barang cetakan dan hasil penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Tersedianya bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	



RENSTRA 2025-2029

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan/Subkegiatan	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				<b>Meningkatnya pengelolaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
				Tersedianya kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya mebel kantor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	



RENSTRA 2025-2029

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan/Subkegiatan	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya layanan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya layanan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya layanan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya layanan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	



RENSTRA 2025-2029

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan/Subkegiatan	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah yang dipelihara</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
				Terpeliharanya kendaraan dinas operasional/lapangan beserta pajak dan perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terpeliharanya mebel kantor	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
				Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpeliharanya/terrehabilitasinya gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	



RENSTRA 2025-2029  
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan

Tabel 4.2

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Urusan Pertanian (Peternakan)</b>															
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya produktivitas pertanian	Persentase produksi bibit ternak	%	51,58	51,98	4.426.338.000,00	52,18	4.159.838.000,00	52,38	4.159.838.000,00	52,58	4.243.034.760,00	52,78	4.327.895.455,00	
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya genetik hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota	Jumlah kelompok pembudidaya Sapi Lokal di Kabupaten Grobogan	Kelompok	8,00	21,00	0,00	26,00	300.000.000,00	31,00	325.000.000,00	36,00	350.000.000,00	41,00	375.000.000,00	
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	1,00	1,00	0,00	1,00	275.000.000,00	1,00	275.000.000,00	1,00	300.000.000,00	1,00	300.000.000,00	
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	25.000.000,00	1,00	25.000.000,00	1,00	25.000.000,00	
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG hewan	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Laporan	1,00	1,00	0,00	1,00	25.000.000,00	1,00	25.000.000,00	1,00	25.000.000,00	1,00	50.000.000,00	
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya mutu dan terjaminnya peredaran benih/bibit ternak dan pakan dalam daerah kabupaten/kota	Persentase Keberhasilan Inseminasi Buatan (IB)	%	1,93	1,93	31.815.000,00	1,93	100.000.000,00	1,93	100.000.000,00	1,93	120.000.000,00	1,93	120.000.000,00	



# RENSTRA 2025-2029

## Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Persentase pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Ternak	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase pengawasan Mutu dan Peredaran Pakan Ternak	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan	12,00	12,00	31.815.000,00	12,00	70.000.000,00	12,00	70.000.000,00	12,00	70.000.000,00	12,00	70.000.000,00	
Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Laporan	12,00	12,00	0,00	12,00	30.000.000,00	12,00	30.000.000,00	12,00	50.000.000,00	12,00	50.000.000,00	
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengendalian dan pengawasan penyediaan serta peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Persentase Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	%	100,00	100,00	53.185.000,00	100,00	70.000.000,00	100,00	70.000.000,00	100,00	70.000.000,00	100,00	100.000.000,00	
Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Terlaksananya Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Dokumen	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	30.000.000,00	
Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Terawasinya Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Laporan	12,00	12,00	53.185.000,00	12,00	70.000.000,00	12,00	70.000.000,00	12,00	70.000.000,00	12,00	70.000.000,00	
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dari daerah kabupaten/kota lain	Persentase penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dari daerah kabupaten/kota lain	%	100	100	4.341.338.000,00	100	3.689.838.000,00	100	3.664.838.000,00	100	3.703.034.760,00	100	3.732.895.455,00	



# RENSTRA 2025-2029

## Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ton	10,00	20,00	79.000.000,00	20,00	150.000.000,00	20,00	150.000.000,00	20,00	180.000.000,00	20,00	200.000.000,00	
Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Ekor	2.971,00	2.618,00	4.262.338.000,00	1.176,00	3.539.838.000,00	1.176,00	3.514.838.000,00	1.176,00	3.523.034.760,00	1.176,00	3.532.895.455,00	
<b>Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>Meningkatnya luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan</b>	<b>Persentase prasarana peternakan kondisi baik</b>	%	60,00	65,00	2.556.079.700,00	67,50	2.556.079.700,00	70,00	2.556.079.700,00	72,50	2.607.201.294,00	75,00	2.659.345.320,00	
<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>Tersedianya prasarana pertanian yang memadai untuk mendukung kegiatan pertanian</b>	<b>Jumlah pembangunan prasarana pertanian sampai dengan tahun n</b>	Unit	5,00	29,00	2.556.079.700,00	46,00	2.556.079.700,00	63,00	2.506.079.700,00	80,00	2.557.201.294,00	97,00	2.609.345.320,00	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	5,00	7,00	1.369.401.200,00	5,00	1.000.000.000,00	5,00	1.000.000.000,00	5,00	1.000.000.000,00	5,00	1.000.000.000,00	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	0,00	7,00	988.859.000,00	3,00	300.000.000,00	3,00	300.000.000,00	4,00	351.121.594,00	5,00	403.265.620,00	
Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas	Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Unit	0,00	9,00	0,00	9,00	900.000.000,00	9,00	1.050.000.000,00	9,00	1.050.000.000,00	9,00	1.050.000.000,00	
Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasi rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Unit	1,00	1,00	197.819.500,00	1,00	356.079.700,00	1,00	156.079.700,00	1,00	156.079.700,00	1,00	156.079.700,00	



**RENSTRA 2025-2029**  
**Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan**

1	2	3	4	5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										16
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang dilestarikan serta dimanfaatkan	Persentase Peningkatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dikelola	%	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	50.000.000,00	5,00	50.000.000,00	5,00	50.000.000,00	
Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Terlaksananya Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Laporan	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	50.000.000,00	12,00	50.000.000,00	12,00	50.000.000,00	
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Menurunnya Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	-1,78	-2,00	404.453.200,00	-2,00	404.453.200,00	-2,00	404.453.200,00	-2,00	412.542.264,00	-2,00	420.793.109,00	
		Persentase kesembuhan penyakit hewan	%	75,00	76,60		77,40		78,20		79,00		80,00		
		Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%	70,00	70,00		70,00		70,00		70,00		70,00		
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Terjaminnya kesehatan hewan dan terkendalinya daerah wabah penyakit hewan menular	Persentase Kasus Kejadian Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis yang Terkendali	%	100,00	100,00	201.502.000,00	100,00	201.502.000,00	100,00	201.502.000,00	100,00	201.502.000,00	100,00	201.502.000,00	



# RENSTRA 2025-2029

## Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Laporan	12,00	12,00	201.502.000,00	12,00	201.502.000,00	12,00	201.502.000,00	12,00	201.502.000,00	12,00	201.502.000,00	
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan serta produk hewan	Persentase Hewan Keluar/Masuk Kabupaten yang Terawasi (Persentase Pengawasan Hewan dan Produk Hewan)	%	21,05	26,32	80.016.000,00	26,32	80.016.000,00	31,58	80.016.000,00	31,58	80.016.000,00	36,84	80.016.000,00	
Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	Laporan	12,00	12,00	0,00	12,00	30.016.000,00	12,00	30.016.000,00	12,00	30.016.000,00	12,00	30.016.000,00	
Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Terkendalinya Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Laporan	12,00	12,00	80.016.000,00	12,00	50.000.000,00	12,00	50.000.000,00	12,00	50.000.000,00	12,00	50.000.000,00	
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner	Persentase Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	%	100,00	100,00	18.000.000,00	100,00	18.000.000,00	100,00	18.000.000,00	100,00	18.000.000,00	100,00	26.250.845,00	
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	12,00	12,00	18.000.000,00	12,00	15.000.000,00	12,00	15.000.000,00	12,00	15.000.000,00	12,00	20.000.000,00	
Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan	Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan	Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan	Dokumen	9,00	9,00	0,00	9,00	3.000.000,00	9,00	3.000.000,00	9,00	3.000.000,00	9,00	6.250.845,00	



# RENSTRA 2025-2029

## Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan

1	2	3	4	5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										16
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	%	100,00	100,00	104.935.200,00	100,00	104.935.200,00	100,00	104.935.200,00	100,00	113.024.264,00	100,00	113.024.264,00	
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	12,00	12,00	25.000.000,00	12,00	25.000.000,00	12,00	25.000.000,00	12,00	25.000.000,00	12,00	25.000.000,00	
Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	1,00	1,00	0,00	1,00	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00	
Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPKH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Terlaksananya Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPKH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPKH HPM	Dokumen	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	
Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Terlaksananya Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	Unit Usaha	NA	50,00	79.935.200,00	50,00	64.935.200,00	100,00	64.935.200,00	100,00	73.024.264,00	100,00	73.024.264,00	
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya penanganan bencana pertanian	Persentase Penanganan bencana Peternakan	%	100,00	100,00	0,00	100,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	100,00	30.600.000,00	100,00	31.212.000,00	
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terkendalinya dampak bencana pertanian melalui penanggulangan yang efektif	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	%	NA	100,00	0,00	100,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	100,00	30.600.000,00	100,00	31.212.000,00	



**RENSTRA 2025-2029**  
**Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Tertanggulangnya Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Laporan	12,00	12,00	0,00	12,00	20.000.000,00	12,00	20.000.000,00	12,00	20.000.000,00	12,00	20.000.000,00	
Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan	Terlaksananya Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Laporan	12,00	12,00	0,00	12,00	10.000.000,00	12,00	10.000.000,00	12,00	10.600.000,00	12,00	11.212.000,00	
<b>Program Perizinan Usaha Pertanian</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan izin usaha pertanian</b>	<b>Persentase rekomendasi teknis Izin Usaha Peternakan yang Diterbitkan</b>	%	100,00	100,00	0,00	100,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	
<b>Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan</b>	<b>Terbitnya izin usaha produksi benih/bibit ternak, pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, dan rumah potong hewan</b>	<b>Persentase permohonan rekomendasi teknis yang terlayani</b>	%	100,00	100,00	0,00	100,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	
Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dokumen	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	12,00	12,00	0,00	12,00	30.000.000,00	12,00	30.000.000,00	12,00	30.000.000,00	12,00	30.000.000,00	
<b>Program Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian petani</b>	<b>Persentase kelembagaan petani yang ditingkatkan</b>	%	10,00	14,00	1.802.900.000,00	16,00	1.572.900.000,00	18,00	1.572.900.000,00	20,00	1.573.758.000,00	22,00	1.605.233.160,00	
<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Meningkatnya pengetahuan, sikap, dan keterampilan petani melalui penyuluhan pertanian</b>	<b>Jumlah Kelompok Tani Ternak yang Terbina</b>	Kelompok	200,00	200,00	1.802.900.000,00	200,00	1.572.900.000,00	200,00	1.572.900.000,00	200,00	1.573.758.000,00	200,00	1.605.233.160,00	



# RENSTRA 2025-2029

## Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	40,00	130,00	56.000.000,00	130,00	200.000.000,00	130,00	200.000.000,00	130,00	200.000.000,00	130,00	230.000.000,00	
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	2,00	26,00	1.746.900.000,00	30,00	1.200.000.000,00	34,00	1.200.000.000,00	38,00	1.200.000.000,00	42,00	1.200.000.000,00	
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit		0,00		1,00	172.900.000,00	1,00	172.900.000,00	1,00	173.758.000,00	1,00	175.233.160,00	
<b>Urusan Perikanan</b>															
Program Pengelolaan Perikanan tangkap	Meningkatnya produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	1.392,30	1.465,10	84.998.800,00	1.468,00	84.999.800,00	1.470,80	84.999.800,00	1.473,50	86.698.776,00	1.476,10	88.432.752,00	
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya pengelolaan penangkapan ikan di wilayah perairan darat kabupaten/kota	Persentase kelompok nelayan yang memperoleh sarana dan prasarana perikanan	%	20,00	40,00	84.998.800,00	50,00	75.000.000,00	60,00	75.000.000,00	70,00	75.000.000,00	80,00	77.144.976,00	
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit	1,00	0,00	0,00	1,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	



# RENSTRA 2025-2029

## Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	4,00	4,00	84.998.800,00	4,00	65.000.000,00	4,00	65.000.000,00	4,00	65.000.000,00	4,00	67.144.976,00	
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Bina Nelayan	%	10,00	14,00	0,00	16,00	9.999.800,00	18,00	9.999.800,00	20,00	11.698.776,00	22,00	11.698.776,00	
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	NA	30,00	0,00	30,00	9.999.800,00	30,00	9.999.800,00	30,00	11.698.776,00	30,00	11.698.776,00	
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	2,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	
<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	<b>Meningkatnya produksi Perikanan budidaya</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>Ton</b>	<b>3.041,55</b>	<b>3.111,85</b>	<b>144.984.600,00</b>	<b>3.143,35</b>	<b>144.984.600,00</b>	<b>3.174,35</b>	<b>144.984.600,00</b>	<b>3.204,35</b>	<b>147.884.292,00</b>	<b>3.233,85</b>	<b>150.841.978,00</b>	
Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian Pembudidaya ikan kecil	Persentase Pembudidaya Ikan Air Tawar yang Dibina	%	6,17	9,49	24.984.600,00	11,39	24.984.600,00	13,28	24.984.600,00	15,18	24.984.600,00	17,08	24.984.600,00	
Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	8,00	5,00	24.984.600,00	5,00	24.984.600,00	5,00	24.984.600,00	5,00	24.984.600,00	5,00	24.984.600,00	
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya pengelolaan pembudidayaan ikan yang berkelanjutan dan berdaya saing	Persentase kelompok pembudidaya ikan yang memperoleh sarana dan prasarana budidaya	%	11,50	16,81	120.000.000,00	19,47	120.000.000,00	23,01	120.000.000,00	26,55	122.899.692,00	30,09	125.857.378,00	
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4,00	4,00	0,00	4,00	10.000.000,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	



# RENSTRA 2025-2029

## Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan

1	2	3	4	5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										16
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	48,00	0,00	50.000.000,00	10,00	20.000.000,00	10,00	20.000.000,00	10,00	20.000.000,00	10,00	20.000.000,00	
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dokumen	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	10.000.000,00	12,00	10.000.000,00	12,00	10.000.000,00	
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2,00	2,00	70.000.000,00	2,00	70.000.000,00	2,00	70.000.000,00	2,00	70.000.000,00	2,00	70.000.000,00	
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Unit	130,00	89,00	0,00	100,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00	100,00	22.899.692,00	100,00	25.857.378,00	
<b>Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	<b>Meningkatnya Produksi Hasil Olahan Perikanan</b>	<b>Jumlah Produksi Produk Olahan Ikan</b>	<b>Ton</b>	<b>322,56</b>	<b>334,45</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>341,48</b>	<b>310.000.000,00</b>	<b>348,48</b>	<b>310.000.000,00</b>	<b>355,87</b>	<b>316.200.000,00</b>	<b>363,27</b>	<b>322.524.000,00</b>	
<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>Terbitnya tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil</b>	<b>Persentase Pertumbuhan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>%</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>285.000.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>285.000.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>291.200.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>297.524.000,00</b>	



**RENSTRA 2025-2029**  
**Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	4,00	4,00	0,00	4,00	10.000.000,00	4,00	10.000.000,00	4,00	10.000.000,00	4,00	10.000.000,00	
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	0,72	0,32	85.000.000,00	0,50	75.000.000,00	0,50	75.000.000,00	0,50	81.200.000,00	0,50	87.524.000,00	
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	37,00	50,00	25.000.000,00	50,00	200.000.000,00	50,00	200.000.000,00	50,00	200.000.000,00	50,00	200.000.000,00	
Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran ikan skala mikro dan kecil	Persentase Pelaku usaha perikanan (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan) yang memperoleh pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan	%	0,00	1,22	0,00	2,49	15.000.000,00	3,75	15.000.000,00	5,02	15.000.000,00	6,29	15.000.000,00	



**RENSTRA 2025-2029**  
**Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Terlaksananya Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Unit Usaha	28,00	20,00	0,00	20,00	15.000.000,00	20,00	15.000.000,00	20,00	15.000.000,00	20,00	15.000.000,00	
Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Terjaminnya mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan kecil	Persentase hasil pengolahan yang dilakukan pengujian mutu dan keamanannya	%	NA	NA	0,00	10,87	10.000.000,00	21,74	10.000.000,00	32,61	10.000.000,00	43,48	10.000.000,00	
Pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Terlaksananya Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah sampel yang diuji mutu dan keamanannya	Sampel	NA	NA	0,00	10,00	10.000.000,00	10,00	10.000.000,00	10,00	10.000.000,00	10,00	10.000.000,00	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100,00	100,00	11.463.484.700,00	100,00	10.578.485.000,00	100,00	11.129.984.700,00	100,00	11.352.584.398,00	100,00	11.579.636.082,00	
		Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		



# RENSTRA 2025-2029

## Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	%	100,00	100,00	60.352.000,00	100,00	60.352.000,00	100,00	96.540.682,00	100,00	112.821.596,00	100,00	117.821.596,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4,00	4,00	46.430.000,00	4,00	46.430.000,00	4,00	76.540.682,00	4,00	87.821.596,00	4,00	87.821.596,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja, ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dan hasil koordinasi penyusunan laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5,00	5,00	13.922.000,00	5,00	13.922.000,00	5,00	20.000.000,00	5,00	25.000.000,00	5,00	30.000.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terseleenggaranya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	%	100,00	100,00	8.603.367.000,00	100,00	8.320.013.500,00	100,00	8.381.613.568,00	100,00	8.423.213.635,00	100,00	8.464.813.703,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	59,00	71,00	8.578.239.000,00	69,00	8.320.013.500,00	69,00	8.361.613.568,00	69,00	8.403.213.635,00	69,00	8.444.813.703,00	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12,00	12,00	25.128.000,00	12,00	0,00	12,00	20.000.000,00	12,00	20.000.000,00	12,00	20.000.000,00	



# RENSTRA 2025-2029

## Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terseleenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu</b>	%	100,00	100,00	511.290.000,00	100,00	500.917.500,00	100,00	810.935.850,00	100,00	521.154.567,00	100,00	881.577.658,00	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan atribut kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	150.000.000,00	3,00	0,00	3,00	150.000.000,00	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12,00	12,00	511.290.000,00	12,00	500.917.500,00	12,00	510.935.850,00	12,00	521.154.567,00	12,00	531.577.658,00	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya pemahaman ASN melalui bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	150.000.000,00	0,00	0,00	60,00	200.000.000,00	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terseleenggaranya administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	%	100,00	100,00	1.138.032.700,00	100,00	975.000.000,00	100,00	1.076.269.600,00	100,00	1.146.269.600,00	100,00	1.206.269.600,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12,00	12,00	54.733.000,00	12,00	40.000.000,00	12,00	50.000.000,00	12,00	60.000.000,00	12,00	70.000.000,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12,00	12,00	224.400.000,00	12,00	200.000.000,00	12,00	220.000.000,00	12,00	240.000.000,00	12,00	250.000.000,00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan hasil penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12,00	12,00	163.549.100,00	12,00	125.000.000,00	12,00	140.000.000,00	12,00	155.000.000,00	12,00	170.000.000,00	



**RENSTRA 2025-2029**  
**Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12,00	12,00	14.200.000,00	12,00	10.000.000,00	12,00	15.000.000,00	12,00	15.000.000,00	12,00	15.000.000,00	
Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12,00	12,00	126.269.600,00	12,00	100.000.000,00	12,00	126.269.600,00	12,00	126.269.600,00	12,00	126.269.600,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	12,00	554.881.000,00	12,00	500.000.000,00	12,00	525.000.000,00	12,00	550.000.000,00	12,00	575.000.000,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya pengelolaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	%	100,00	100,00	150.001.000,00	100,00	75.000.000,00	100,00	50.000.000,00	100,00	400.000.000,00	100,00	125.528.525,00	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel kantor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	50.000.000,00	10,00	25.528.525,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	28,00	10,00	150.001.000,00	10,00	75.000.000,00	10,00	50.000.000,00	10,00	50.000.000,00	10,00	100.000.000,00	



**RENSTRA 2025-2029**  
**Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan**

1	2	3	4	5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										16
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	277.815.000,00	100,00	265.000.000,00	100,00	269.625.000,00	100,00	274.125.000,00	100,00	278.625.000,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya layanan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	12,00	8.080.000,00	12,00	5.000.000,00	12,00	6.000.000,00	12,00	6.000.000,00	12,00	6.000.000,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya layanan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	12,00	181.125.000,00	12,00	180.000.000,00	12,00	181.125.000,00	12,00	183.125.000,00	12,00	185.125.000,00	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya layanan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	12,00	0,00	12,00	5.000.000,00	12,00	5.000.000,00	12,00	5.000.000,00	12,00	5.000.000,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya layanan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	12,00	88.610.000,00	12,00	75.000.000,00	12,00	77.500.000,00	12,00	80.000.000,00	12,00	82.500.000,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	%	100,00	100,00	722.627.000,00	100,00	382.202.000,00	100,00	445.000.000,00	100,00	475.000.000,00	100,00	505.000.000,00	



**RENSTRA 2025-2029**  
**Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan**

1	2	3	4	5	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										16
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional/lapangan beserta pajak dan perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	36,00	65,00	157.202.000,00	65,00	157.202.000,00	65,00	160.000.000,00	65,00	160.000.000,00	65,00	160.000.000,00	
Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya mebel kantor	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	10.000.000,00	20,00	10.000.000,00	20,00	10.000.000,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	248,00	225,00	129.813.000,00	230,00	100.000.000,00	235,00	125.000.000,00	240,00	130.000.000,00	245,00	135.000.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/terhabilitasinya gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12,00	12,00	435.612.000,00	12,00	125.000.000,00	12,00	150.000.000,00	12,00	175.000.000,00	12,00	200.000.000,00	



#### 4.1.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja. Program Prioritas Pembangunan Daerah yang dilaksanakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
2. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
3. Program Penyuluhan Pertanian.
4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.
5. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah di atas meliputi sebagai berikut:

1. Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
3. Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya
4. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
5. Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan
6. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
7. Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
8. Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPKH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)
9. Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan
10. Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis
11. Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan
12. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
13. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa



14. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
15. Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil
16. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
17. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
18. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
19. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
20. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
21. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko
22. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
23. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
24. Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil
25. Pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil

**Tabel 4.3**

**Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas  
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan**

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan /Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
1	<b>Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	Menurunnya Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan		



No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan /Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
			<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota</b>	
			Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			<b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	
			Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	
			<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	
			Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan	
			<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	
			Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	
			Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	
			Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPKH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	
			Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	



No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan /Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
2	<b>Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>	Meningkatnya penanganan bencana pertanian		
			<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	
			Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	
			Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan	
3	<b>Program Penyuluhan Pertanian</b>	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian petani		
			<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
			Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	
4	<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	Meningkatnya produksi Perikanan budidaya		
			<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	
			Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	
			<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	
			Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	



No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan /Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
			Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	
5	<b>Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	Meningkatnya Produksi Hasil Olahan Perikanan		
			<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	
			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	
			Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			<b>Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil</b>	
			Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	
			<b>Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil</b>	



No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan /Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
			Pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	

#### 4.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi. IKU berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030.

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah tercantum pada tabel berikut:

**Tabel 4.4**

#### **Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029**

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, peternakan dan perikanan ADHK	%	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	



#### 4.3. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Peternakan dan Perikanan Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Target kinerja penyelenggaraan urusan Peternakan dan Perikanan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) tercantum pada tabel berikut.

Tabel 4.5

#### Indikator Kinerja Kunci Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/ kota	% per tahun	-2	-2	-2	-2	-2	-2	



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan Substansial

Dokumen Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2025–2029 merupakan turunan dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2025–2029, dengan visi pembangunan daerah yaitu “Menuju Grobogan Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”. Renstra ini disusun sebagai pedoman strategis bagi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan dalam merumuskan arah kebijakan, sasaran, serta program dan kegiatan yang mendukung terwujudnya visi daerah secara efektif dan terukur.

#### 5.2. Kaidah Pelaksanaan

Sebagai pedoman pelaksanaan, ditetapkan beberapa kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Daerah Kabupaten Grobogan adalah dokumen rencana pembangunan lima tahunan yang menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan. Dokumen ini digunakan untuk pengajuan pendanaan melalui RAPBD periode 2025-2029, dengan tahun 2030 berfungsi sebagai masa transisi agar seluruh program dan kegiatan dapat berjalan secara berkelanjutan, transparan, dan akuntabel.
2. Dokumen Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan dijadikan pedoman untuk menetapkan perjanjian kinerja, serta menyusun laporan kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan pada periode 2025–2029.
3. Bidang-bidang pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan diharapkan mendukung pencapaian target-target indikator kinerja pada dokumen Renstra, dan melaksanakan program serta kegiatan yang tercantum pada Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan dengan sebaik-baiknya.
4. Jika terdapat perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional maupun kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta di Kabupaten Grobogan, Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2025–2029



dapat disesuaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Masa berlaku Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 adalah sesuai dengan masa berlaku RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Peternakan dan Perikanan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2030.

### **5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan**

Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan akan dilengkapi dengan dokumen Pengelolaan Risiko Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RSO) yang bertujuan untuk mengendalikan risiko-risiko prioritas atas Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bupati Grobogan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan, sekaligus menjamin tercapainya target Indikator Kinerja pada dokumen Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Tahun 2025–2029 dan tahun 2030 sebagai masa transisi, diperlukan upaya pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan, serta hasil dari program dan kegiatan yang dijalankan. Untuk melihat hasil pencapaian Renstra ini, perlu dilakukan evaluasi minimal satu kali dalam lima tahun.

Pengendalian dan pengawasan terhadap implementasi Renstra dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan. Dalam pelaksanaannya, Kepala Badan dibantu oleh seluruh jajaran di lingkungan instansi, bekerja secara kolektif untuk memastikan program-program berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diharapkan. Pendekatan ini dirancang untuk menciptakan sinergi antara perencanaan strategis dan pelaksanaan teknis di lapangan.

Dokumen ini juga bersifat dinamis, memungkinkan adanya revisi dan penyempurnaan guna mengatasi berbagai kekurangan yang mungkin muncul dalam perencanaan pembangunan. Renstra ini tidak hanya menjadi panduan kerja tetapi juga



alat evaluasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan di bidang Peternakan dan Perikanan. Semua target yang telah dirumuskan dalam Renstra ini dapat tercapai dengan dukungan penuh dari berbagai pihak terkait. Kolaborasi lintas sektor dengan unsur *pentahelix* menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Sebagai penutup, dokumen renstra ini diharapkan dapat menjadi landasan kokoh dalam penyusunan perencanaan strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan. Melalui arahan dan tujuan yang jelas, renstra ini akan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dukungan dan kerja sama semua pihak sangat diperlukan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang telah dirancang demi kemajuan Kabupaten Grobogan.